

**STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI MARUMASA
DI KABUPATEN BULUKUMBA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Bosowa**

Oleh:

FIRDHA NUR ANANDA

4518021035

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Marumasa
Di Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Firdha Nur Ananda

Nomor Stambuk : 4518021035

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

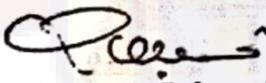
Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

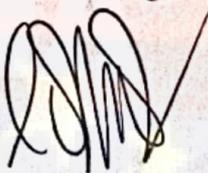
Makassar, 23 Agustus 2022

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II

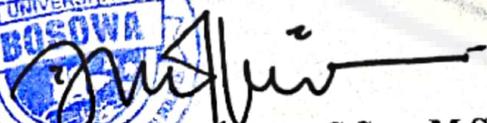

Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si
NIDN. 0907076701


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 0915098603

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005


Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

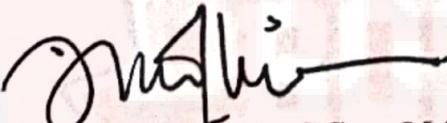
HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dengan Judul Skripsi **Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Marumasa Di Kabupaten Bulukumba**

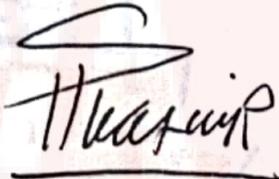
Nama : **Firdha Nur Ananda**
Nomor Stambuk : **4518021035**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian :


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

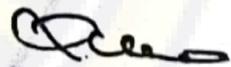
Ketua

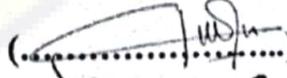
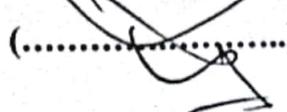

Drs. Natsir Tompo, M.Si

Sekretaris

Tim Penguji :

1. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
3. Ade Ferry Afrial, SH., M.SC
4. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Firdha Nur Ananda

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bosowa

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : **Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pantai
Marumasa Di Kabupaten Bulukumba**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, 20 Agustus 2022

Penulis,



Firdha Nur Ananda

4518021035

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Marumasa Di Kabupaten Bulukumba", sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi penulis, namun atas bantuan dan bimbingan serta dukungan dari semua pihak yang terlibat di dalamnya sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Untuk itu perkenankanlah penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada kedua rang tua tercinta Ayahanda Nurdin Munaja dan Ibunda Irmawaty Syam yang telah senantiasa memberi perhatian, membersarkan, mendidik dan mendoakan setiap langkah penulis serta memberi dukungan berbentuk moril maupun materil yang tidak dapat terbalaskan. Begitupun juga kepada Adik tercinta Muhammad Daffa Arroihan, serta seluruh keluarga besar atas perhatian dan pengorbanannya selama ini kepada penulis.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih bagi penulis dan ungkapan yang tiada batas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Yth, Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.S Selaku Rektor Universitas Bosowa Makasar.
2. Yth, Bapak Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
3. Yth, Dr. Hj. Asmirah, M.Si Selaku Wakil Dekan 1 dan Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
4. Yth, Drs. Natsir Tompo, M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
5. Yth, Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si Selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan, arahan, nasehat, dan petunjuk mengenai hal teknis dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
6. Yth, Nining Haslinda Zainal.S.Sos.,M.Si. Selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan, arahan, dan petunjuk mengenai hal teknis dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa, yang telah mendidik dan mengajarkan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Keluarga Besar DEMA (Dewan Mahasiswa) KEMA (Keluarga Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang telah memberikan semangat dan doa serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.
9. Keluarga Besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) KEMA (Keluarga Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa bagi penulis serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.
10. Keluarga Besar HIMAN (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang telah memberikan semangat, doa, dan kerja sama serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.
11. Teman – teman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa khususnya teman seperjuangan Arash 18 yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Sahabatku tercinta Chintya Gita Sentani yang memberikan semangat, dukungan, doa dan menemani dalam penyusunan skripsi ini.
13. Sahabatku terbaik Apriana yang menjadi tempat mengeluh selama penyusunan skripsi sampai selesai dan selalu setia menemani serta memberikan masukan, doa, dukungan, dan semangat bagi penulis.

Terima kasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada semua insan yang tercipta yang pernah bersentuhan dengan jalan hidup penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mungkin masih banyak kekurangan atau kelemahan dalam penyusunan maupun dari pandangan pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik dan juga penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kebenaran datangnya dari Allah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Makassar, 20 Agustus 2022

Penulis



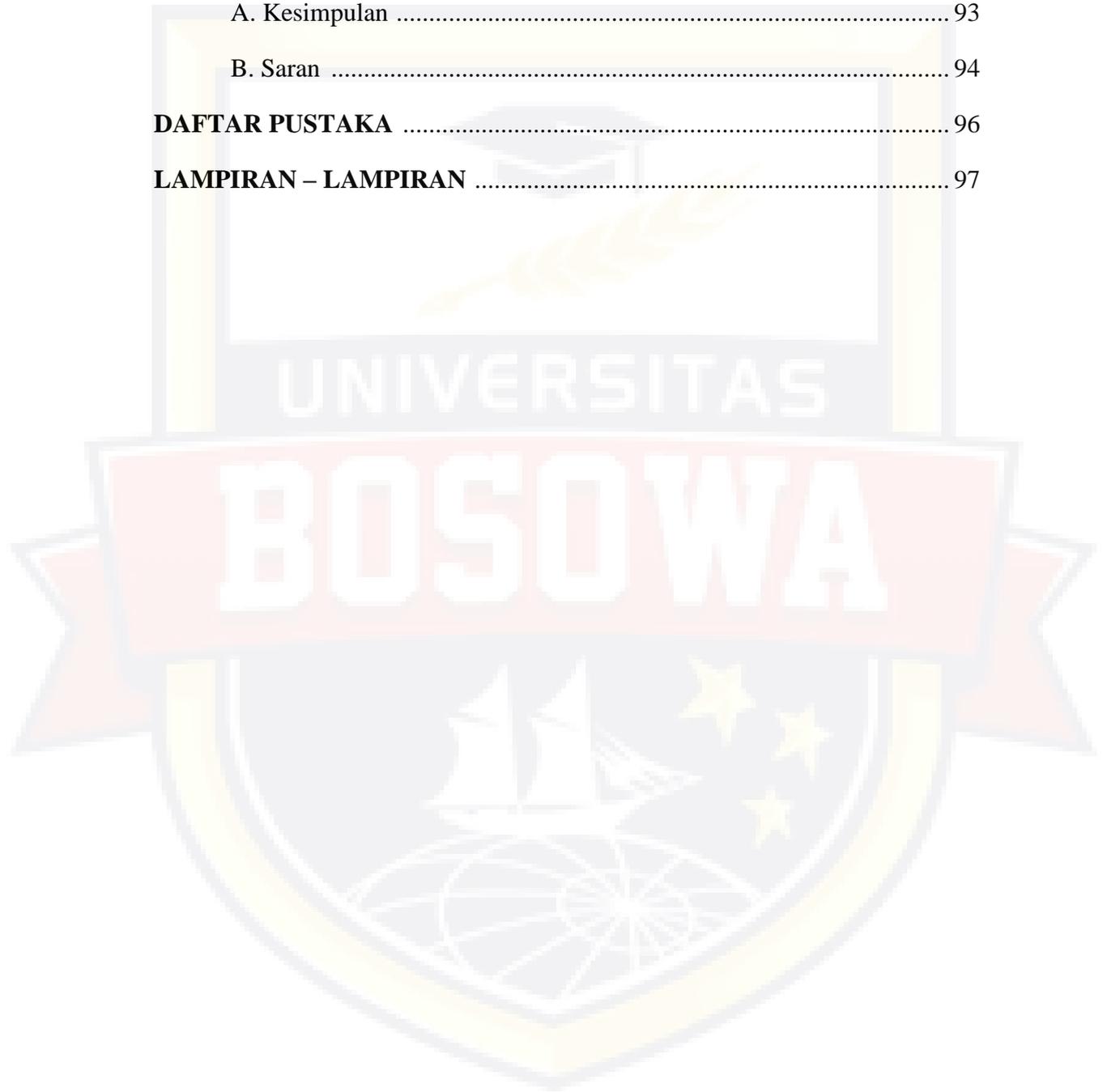
Firdha Nur Ananda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
HALAMAN PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusah Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Strategi	9
1. Pengertian Strategi	9
2. Manajemen Strategi	10
3. Tingkatan Strategi	11
B. Konsep Pengembangan	13
1. Pengertian Pengembangan	13
2. Unsur-unsur Pengembangan	14
C. Konsep dan Strategi Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	16

D. Konsep Peran Pemerintah	17
1. Pengertian Peran	17
2. Pengertian Pemerintah Daerah	17
3. Peran Pemerintah Daerah	18
E. Konsep Pariwisata	20
1. Pengertian Pariwisata	20
2. Unsur-unsur pariwisata.....	21
3. Objek Wisata dan Pengembangannya	24
F. Penelitian Terdahulu	25
G. Kerangka Konsep	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Informan Penelitian	32
F. Teknik Analisis Data	32
G. Teknik Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	35
B. Hasil Penelitian	69
1. Metode Pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba	69
2. Dukungan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba	83

C. Pembahasan Hasil Penelitian	93
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN – LAMPIRAN	97



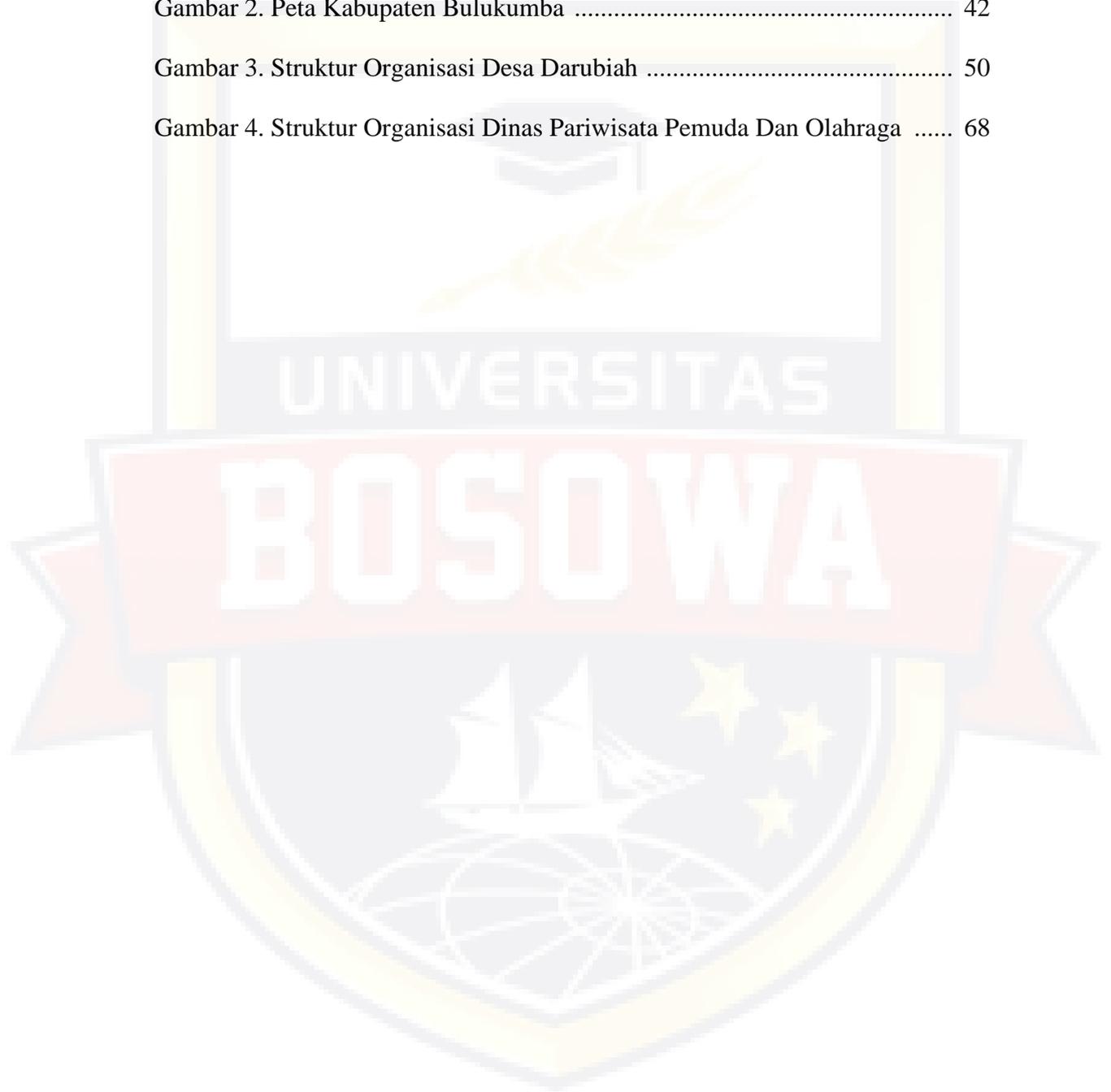
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2. Luas Wilayah dan Panjang Garis Pantai Kecamatan Bonto Bahari...	36
Tabel 3. Tabel Demografi	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep	29
Gambar 2. Peta Kabupaten Bulukumba	42
Gambar 3. Struktur Organisasi Desa Darubiah	50
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	68



ABSTRACT

This study aims to determine the strategies used by the government in developing Marumasa Beach tourism objects in Bulukumba Regency and to find out what support the government has given to Marumasa Beach tourism objects in Bulukumba Regency. This type of research is descriptive qualitative. The types of data used are primary data and secondary data. Determination of informants is done by purposive sampling technique. Meanwhile, data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data analysis technique is by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and levers. The results of this study indicate that the development strategy carried out by the government in developing tourism objects is still less effective because the facilities provided do not yet exist so that the facilities and infrastructure provided are not yet available. there is still minimal at Marumasa Beach. The shaman that has been given by the Government Service and Local Government is still communicating morally with the people of Darubiah Village regarding the development of the tourist area. The government always provides mutual motivation and mutual synergy.

Keywords: *Tourism, strategy, government support*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui dukungan apa yang diberikan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sementara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata masih kurang efektif karena fasilitas yang diberikan belum ada sehingga sarana dan prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih minim. Dukungan yang telah diberikan Pemerintah Dinas dan Pemerintah Daerah masih melakukan komunikasi secara moril dengan masyarakat Desa Darubiah terkait pengembangan kawasan wisata. Pemerintah selalu memberikan motivasi dan saling bersinergitas bersama.

Kata kunci: Pariwisata, strategi, dukungan pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah bisnis jasa yang mengandalkan inovasi. Indonesia yang memiliki banyak potensi dalam bisnis pariwisata harus dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk kepentingan masyarakat (Kominfo.go.id, 2015). Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau, beraneka keindahan alamnya dan penduduknya yang terdiri dari ratusan suku bangsa, sesungguhnya memiliki potensi wisata alam, sosial dan budaya yang besar. Potensi dan sumber daya alam yang ada dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik. Sebagian besar sumber daya alam tersebut telah dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi beberapa objek wisata. Mengingat daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah karena keindahan alam dan kekayaan seni budayanya, maka tidak heran jika potensi ini menarik untuk dikembangkan (Pendit, 2002:66).

Kawasan Strategis Pariwisata meliputi kawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata: Kesesuaian lokasi untuk pariwisata strategis dinilai dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 1. Sumber daya wisata alam dan budaya yang berpotensi untuk menjadi tempat wisata; 2. Potensi pasar; 3. Lokasi strategis yang berkontribusi terhadap persatuan nasional dan keutuhan wilayah; 4. Tindakan perlindungan terhadap lokasi tertentu yang memberikan

kontribusi terhadap fungsi dan daya dukung; 5. Kesiapan dan dukungan masyarakat; 6. Potensi pasar. Dalam rangka berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan NKRI, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dikembangkan lokasi-lokasi pariwisata yang strategis. Sangat penting bahwa kawasan strategi wisata mempertimbangkan keragaman budaya, sosial ekonomi, dan agama di daerah sekitarnya.

Menurut (Barreto, M dan Ketut G 2015), strategi adalah bagaimana suatu organisasi mengidentifikasi suatu kondisi yang dapat berpeluang memberikan keuntungan terbaik dan membantu mencapai tujuan yang diharapkan untuk meningkatkan kompetensi dan mencapai keunggulan bersaing. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah mengidentifikasi suatu kondisi guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut (Suparmoko, 2002:199) dalam mempersiapkan strategi ada langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu sebagai berikut : a. Mengidentifikasi sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor; b. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya mudah untuk dikembangkan dan mencari faktor penyebabnya; c. Mengidentifikasi sumber daya yang siap digunakan untuk mendukung pengembangan. Menentukan strategi pengembangan sektor yang dapat menarik sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian dapat berkembang.

Pengembangan pariwisata merupakan amanat UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan (Pasal 11 UU No. 10 Tahun 2009). Pengembangan pariwisata di Indonesia bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, mengembangkan budaya, memperbaiki citra bangsa, dan memperkuat hubungan dengan negara lain (Sutawa, 2012). Menurut (Suwanto, 2004:19-24) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan meliputi : 1. Obyek dan daya tarik wisata; 2. Prasarana wisata; 3. Sarana wisata; 4. Tata laksana atau infrastruktur.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut (Rotua dan Rudi, 2016: 79-96).

Undang-undang yang diundangkan pada tahun 2015 menyatakan bahwa “(1) Pemerintahan Pusat disebut sebagai Presiden Indonesia, Wakil Presiden, dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah,” sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015.

Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan mungkin merupakan salah satu lokasi wisata paling populer di Indonesia bagi wisatawan lokal dan internasional. Perbukitan di kaki Gunung Bawakaraeng Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan lautan lepas merupakan empat wilayah Kabupaten Bulukumba yang terpisah dari segi geografi. Kabupaten Bulukumba terletak di bagian paling selatan dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Bisnis perahu phinisi sudah terkenal di daerah ini, dan menciptakan nilai ekonomi tambahan yang cukup besar baik bagi masyarakat maupun pemerintah setempat. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,58 km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km². Bulukumba memiliki 25 objek wisata yang kaya dengan keindahannya. Salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan yaitu pantai marumasa. Hal ini dikarenakan Pantai Marumasa tak hanya menyuguhkan keindahan pantainya tapi juga terdapat tebing yang eksotis untuk menikmati pemandangan matahari terbit di pantai ini. Pantai Marumasa sendiri terletak di Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Adapun berbagai masalah kepariwisataan di Kabupaten Bulukumba antara lain: (1) Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata; (2) Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata; (3) Rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur; (4) Rendahnya peran aktif dan sadar wisata dari pelaku pariwisata (ppid.bulukumbakab.go.id, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Pasal 16 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Strategi Pengembangan kepariwisataan Daerah, meliputi:

a. Strategi Pembangunan Destinasi Kepariwisata Daerah, yaitu: (1) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus berbasis Destinasi pariwisata Daerah Kawasan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan; (2) pembangunan sarana pariwisata dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah; (3) pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata melalui komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata daerah; (4) optimalisasi Destinasi Wisata secara berkelanjutan; (5) pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dalam rangka mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata; (6) optimalisasi potensi sumber daya alam sebagai Destinasi Wisata; (7) pembangunan bandar udara dan pelabuhan dalam rangka mendukung sistem sirkulasi pergerakan wisatawan; (8) optimalisasi potensi wisata budaya secara spesifik dan berdaya saing; (9) pengemasan Destinasi Wisata dan daya tarik pariwisata dalam bentuk paket pariwisata; (10) meningkatkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya serta swasta dalam rangka peningkatan infrastruktur wisata berdasarkan segmentasi wisata

bahari, alam, budaya/sejarah, dan wisata buatan; dan (11) peningkatan aksesibilitas menuju objek dan daya tarik wisata. Berdasarkan peraturan daerah Bupati Bulukumba, Pemerintah atau Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah.

Pantai Marumasa mulai dikenal dari tahun 2017. Saat itu seorang pemuda asli daerah tersebut yang bernama Iruk Sugiarto mulai memperkenalkan memopulerkan lewat media sosial. Semuanya bermula disekitar bulan Februari. Keelokan pantainya terlihat dari hamparan pasir putihnya yang memanjang, udaranya juga sangat sejuk sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur.

Sarana dan prasarana pantai masih kurang karena masyarakat setempat masih mengelola Pantai Marumasa dalam kondisi alamnya. Akibatnya, pantai ini tidak menerima jumlah pengunjung yang signifikan, sehingga tetap mempertahankan aspek alamnya. Terdapat banyak perahu atau sampan yang ditambatkan di sepanjang pantai karena selain sebagai objek wisata, pantai ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memarkir perahu atau sampan yang biasa mereka gunakan untuk menangkap ikan. Akibatnya, ada beberapa perahu dan kano yang ditambatkan di sepanjang pantai. Karena tidak ada transportasi umum yang akan membawa Anda ke Pantai Marumasa, cara terbaik untuk sampai ke sana adalah dengan mobil, karena pantai tidak dapat diakses dengan cara lain. Status jalan menuju pantai ini buruk karena belum

diaspal atau beton sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui. Akibatnya, pengunjung disarankan untuk berkendara perlahan di sepanjang rute ini.

Kurangnya dukungan untuk pertumbuhan dan pelestarian di kawasan wisata ini, dan akibatnya, tidak ada fasilitas tambahan yang tersedia untuk mendukung berbagai macam kegiatan pariwisata. (berakhirpekan.com, 11 Mei 2020).

Perlunya upaya pengembangan pariwisata objek wisata di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba, agar dapat memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat yang berusaha di sektor wisata tersebut. Masih kurangnya sarana dan prasarana objek wisata di Pantai Marumasa, sehingga sarana dan prasarananya belum memadai.

Dengan melihat paparan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait “Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Marumasa Di Kabupaten Bulukumba”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana metode pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan obyek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana dukungan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui metode pengembangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan obyek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba
2. Mengetahui dukungan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi baru serta menjadi landasan dan acuan bagi penelitian pengembangan pariwisata di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi dan penambah wawasan bagi masyarakat secara umum terkait strategi pengembangan pariwisata.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba agar dapat menerapkan dan sebagai percontohan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut (Barreto, M dan ketut G 2015), strategi adalah bagaimana suatu organisasi mengidentifikasi suatu kondisi yang dapat berpeluang memberikan keuntungan terbaik dan membantu mencapai tujuan yang diharapkan untuk meningkatkan kompetensi dan mencapai keunggulan bersaing. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah mengidentifikasi suatu kondisi guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Perencanaan strategis, seperti yang didefinisikan oleh (Pearce II dan Robinson, 2008), adalah pendekatan jangka panjang yang diarahkan ke masa depan dan dirancang untuk bekerja sama dengan lingkungan kompetitif perusahaan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dari penjelasan ini, jelas bahwa strategi adalah proses persiapan kegiatan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, berdasarkan keputusan kolaboratif dan perspektif pelanggan.

Seperti yang didefinisikan oleh (Rivai dan Darsono, 2015), strategi adalah “seperangkat taktik dan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir organisasi” (target atau objektif). Strategi yang efektif harus

menggabungkan dan mengintegrasikan semua banyak bagian dari sebuah organisasi besar untuk mencapai tujuan akhirnya.

2. Tipe-tipe Strategi

Strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis adalah tiga jenis strategi secara umum. Ketiga kelompok ini dapat digunakan untuk mengatur dan mengkategorikan taktik (Rangkuti, 2014:7).

1. Strategi Manajemen

Dalam konteks strategi makro, strategi manajemen mengacu pada strategi-strategi yang dapat ditempuh oleh manajemen. Ketika berbicara tentang banyak aspek strategi bisnis perusahaan, ada banyak pilihan.

2. Strategi Investasi

Strategi ini berfokus pada melakukan investasi di berbagai bisnis. Strategi pertahanan, strategi membangun kembali divisi baru, strategi divestasi, dan lain-lain adalah contoh strategi yang dapat diterapkan, apakah korporasi ingin melakukan rencana ekspansi yang agresif atau bertujuan untuk menembus pasar.

3. Strategi Bisnis

Istilah "strategi bisnis fungsional" kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan bentuk rencana perusahaan ini. Itu karena strategi ini menitikberatkan pada tugas manajerial. Untuk menyebutkan beberapa saja, ada strategi untuk segala hal mulai dari pemasaran hingga manufaktur dan operasi hingga distribusi hingga manajemen dan keuangan.

3. Tingkatan Strategi

Menurut (Wheelen dan David, 2008:15), strategi organisasi yang signifikan melewati banyak tahapan. Menurut Wheelen dan David, ada tiga tahap strategi manajemen yang berubah sebagai respons terhadap pertumbuhan perusahaan:

1. Strategi Korporasi (Corporate strategy)

Ini adalah strategi yang menguraikan arah bisnis secara keseluruhan, dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan tidak hanya untuk perusahaan secara keseluruhan tetapi juga untuk pengelolaan berbagai lini produknya. Strategi tingkat korporat ini dapat menggunakan tiga taktik utama, salah satunya dikenal sebagai strategi pertumbuhan. Strategi ini ditentukan berdasarkan tahap perkembangan perusahaan saat ini. Perusahaan yang mengalami kerugian pendapatan dapat memutuskan untuk mengadopsi strategi stabilitas untuk mengurangi konsekuensi penurunan. Akhirnya, strategi penghematan adalah salah satu yang digunakan untuk membatasi atau mengurangi kegiatan organisasi.

2. Strategi Bisnis (Business Strategy)

Strategi yang menekankan pada daya saing barang dan jasa perbankan pada industri atau segmen pasar tertentu. Pendekatan ini dapat digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis.

"Strategi Keunggulan Biaya", "Strategi Diferensiasi", dan "Strategi Fokus" adalah di antara tiga jenis strategi yang dapat diterapkan dalam

strategi tingkat bisnis ini. Metode penekanan secara keseluruhan mencakup fokus biaya dan fokus pembeda. Departemen bertanggung jawab atas strategi di tingkat perusahaan. Manajer yang telah ditugaskan ke manajemen puncak untuk mengoperasikan organisasi yang bersangkutan akan menjadi orang yang merancang dan mengimplementasikan rencana pada tingkat ini. Strategi generik adalah kata yang biasanya digunakan untuk merujuk pada rencana implementasi unit bisnis.

Strategi bisnis korporasi berfungsi sebagai kerangka kerja untuk upaya terfokus dan berkelanjutan yang ditujukan untuk mencapai tujuan komersial jangka panjang. Rencana bisnis menjabarkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Akibatnya, strategi bisnis dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang mencakup semua dan luas yang mengarahkan operasi utama perusahaan. Sedangkan kata "strategi bisnis" bagi korporasi mengacu pada pola keputusan yang dibuat di dalam organisasi yang memutuskan dan mengungkapkan maksud, tujuan, dan sasaran yang mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi bisnis terbatas untuk menentukan bagaimana perusahaan akan bersaing di sektornya dan di mana ia akan memposisikan dirinya dalam kaitannya dengan pesaingnya, sedangkan strategi perusahaan berlaku untuk semua bisnis, terlepas dari ukuran atau ruang lingkungannya.

3. Strategi Fungsional (Functional Strategy)

Ini adalah strategi yang melibatkan manajemen operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia di tingkat fungsional. Penelitian dan pengembangan adalah salah satu area di mana penerapan strategi ini akan memperluas domain fungsional perusahaan dan memberikan keunggulan atas para pesaingnya. Rencana ini harus mencakup referensi ke bisnis dan strategi perusahaan. Mengutamakan pencapaian tingkat produktivitas terbaik dari sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien. Istilah "strategi berbasis nilai" dan "strategi fungsional" biasanya digunakan secara bergantian.

B. Konsep Pengembangan

1. Pengertian Pengembangan

Hukum Indonesia mendefinisikan pembangunan sebagai kegiatan ilmiah dan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi, keunggulan, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau untuk menciptakan yang baru, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2002.

Penulis (Warsita, Gagne, dan Brings, 2007) Pengembangan adalah metode pengajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam pendidikannya. Dengan kata lain, ini adalah serangkaian peristiwa yang dirancang untuk memengaruhi dan mendukung proses pembelajaran internal

atau upaya apa pun untuk secara aktif menciptakan kondisi agar tercapainya tujuan pembelajaran.

Pendidikan, baik formal maupun informal, dapat diartikan sebagai upaya memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, harmonis (Iskandar Wiryokusumo, 2011). Menurut definisi ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengembangan adalah tindakan yang terjadi secara teratur dan telah ditunjukkan untuk meningkatkan atau menghasilkan kualitas yang lebih besar.

2. Unsur-unsur Pengembangan

Menurut (Suwanto, 2004:19-24) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan meliputi :

1. Obyek dan daya tarik wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah.

2. Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, terminal dan lain sebagainya. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan

kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu obyek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri.

3. Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan ialah hotel, biro perjalanan, balai transportasi, restoran dan rumah makan serta saranapendukung lainnya. Tidak semua obyek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kualitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan.

4. Tata laksana atau infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan di bawah tanah, seperti sistem pengairan, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai, sistem komunikasi, sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan, akan meningkatkan daya tarik suatu obyek wisata. Infrastruktur yang

memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan membantu meningkatkan fungsi sarana wisata, sekaligus membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya.

C. Konsep dan Strategi Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam sustainability development (McIntyre, 1993:10):

1. Ecological Sustainability, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada.
2. Social and Cultural Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.
3. Economic Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang.

D. Konsep Peran Pemerintah

1. Pengertian Peran

Istilah "peran" berasal dari kata "peran". Peran dapat memiliki arti; misalnya, individu dari masyarakat tertentu harus memiliki seperangkat kompetensi yang dibutuhkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845).

Menurut (Soekanto, 2002:243) peran adalah komponen dinamis dari kedudukan (status), dan seseorang dianggap berperan jika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Ketika datang untuk menyelesaikan kewajiban, tugas, atau tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka oleh perusahaan atau organisasi, setiap orang membawa kombinasi unik dari kemampuan dan pengalaman ke meja. Peran menurut (Gibson, Inancevich, dan Donnelly, 2002) adalah orang yang harus berinteraksi dengan dua sistem, yang paling sering adalah organisasi. Berdasarkan apa yang telah diuraikan selama ini, dapat disimpulkan bahwa peran adalah jabatan yang dipegang oleh seseorang yang berhak atas manfaat tertentu dan bertanggung jawab atas tanggung jawab tertentu sesuai dengan fungsi yang dilakukannya dalam masyarakat.

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah segala tindakan yang dilakukan oleh badan publik, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam rangka mencapai tujuan negara, menurut (C.F. Strong, 2014:10). Kata "pemerintah" memiliki arti luas dalam definisi ini. Namun, ketika digunakan dalam arti sempit, istilah "pemerintah" mengacu pada semua

operasi badan publik yang semata-mata diatur oleh kekuasaan eksekutif. Menurut konsep otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Daya saing regional dan kesejahteraan masyarakat meningkat, demikian pula ekonomi lokal dan keterlibatan masyarakat, sebagai hasil dari upaya ini.

Ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hal ini. Mengingat Indonesia adalah negara federal, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti persamaan dan keadilan dengan tetap memperhatikan perbedaan wilayah. Berdasarkan pemahamannya tentang keadaan tersebut, peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pemerintah adalah badan publik yang melayani masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.

3. Peran Pemerintah Daerah

Dapat kita lihat dari empat indikator Menurut (Pitana dan Gayatri, 2005), ada empat peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah, yakni Koordinator, Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator sebagai berikut :

1. Koordinasi

Dalam mengembangkan suatu obyek wisata tentu ada koordinasi antara suatu instansi pemerintah agar wisata tersebut dapat berkembang

dengan baik. Pemerintah daerah dapat menjadi koordinator dalam membuat kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam merencanakan suatu kebijakan baru perlu adanya musyawarah bersama sehingga dapat membuat suatu kesepakatan bersama antara dinaspariwisata, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat lainnya agar dapat mengembangkan obyek wisata dengan baik.

2. Motivasi

Untuk mengembangkan pariwisata, peran pemerintah dinas pariwisata untuk memotivasi sangat diperlukan agar kepariwisataan itu dapat berjalan dan usaha pariwisata terus berjalan dengan lancar. Pemerintah desa dan masyarakat merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

3. Fasilitas

Dalam pengembangan obyek wisata peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi segala kebutuhan kepariwisataan sehingga kepariwisataan dapat terwujud. Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh kelompok sadar wisata. Adapun pada praktiknya Dinas Pariwisata mengadakan kerja sama dengan Pemerintah

Desa dalam penyediaan segala kebutuhan kelompok sadar wisata untuk menjalankan program kegiatannya.

4. Dinamisasi

Dalam mengembangkan kepariwisataan yang baik, perlu adanya peran yang sinergis antara dinas pariwisata, pemerintah desa dan masyarakat agar dapat mencapai suatu pembangunan yang ideal. Dinas pariwisata sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan pihak-pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

E. Konsep Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata didefinisikan sebagai berbagai kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. . antara pengunjung dengan penduduk lokal, wisatawan lain, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemilik usaha di tempat yang dikunjunginya.

“Perpindahan sementara individu ke lokasi di luar rumah dan tempat kerja mereka dan pelaksanaan kegiatan selama di tempat tujuan, serta pengembangan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka,” menurut

Mathieson dan Wall, dikutip dalam (Pitana dan Gayatri, 2005). Pariwisata adalah jenis kegiatan yang mencakup perjalanan individu ke daerah selain rumah dan tempat kerja mereka untuk waktu yang singkat.

Makna pariwisata dalam pandangan (Burkart dan Medlik, 1981: 46).

Empat ciri khas wisatawan adalah sebagai berikut:

Wisatawan adalah orang-orang yang pergi ke berbagai tempat dan menetapkan kehidupannya di sana.

1. Karena daerah tempat warga menelepon ke rumah dan bekerja setiap hari berbeda dari tempat wisata, maka kegiatan yang dilakukan pengunjung berbeda dengan yang dilakukan penduduk setempat yang tinggal dan bekerja di tempat tujuan wisata.
2. Karena liburan seorang turis singkat dan lama, para pelancong mengharapkan untuk kembali ke rumah dalam hitungan hari atau bulan.
3. Tujuan liburan bukanlah untuk mencari pekerjaan atau tempat tinggal setelah wisatawan sampai di tempat tujuan guna menghidupi diri sendiri.

2. Unsur-unsur pariwisata

Selain daya tarik, kenyamanan perjalanan, fasilitas, dan fasilitas, ekonomi pariwisata yang sukses membutuhkan promosi. Perluasan pariwisata memerlukan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan tiga bidang minat: industri pariwisata, daya dukung

lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat lokal, semuanya dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup. Berikut ini adalah komponen-komponen pengembangan industri pariwisata menurut (Kurniawan, 2015):

1. Atraksi

Keadaan alam (pemandangan indah, flora dan satwa liar, fitur perairan laut, danau), barang-barang buatan manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno, dan sebagainya), dan aspek dan acara budaya semuanya dapat menjadi sumber daya tarik. Keadaan alam (pemandangan yang indah, flora dan satwa liar, fitur perairan pantai, danau) dapat memberikan atraksi atau atraksi (seni, adat istiadat, makanan dan sebagainya).

2. Transportasi

Perkembangan transportasi berdampak baik pada jumlah wisatawan maupun jumlah hotel dan alternatif penginapan lainnya. Selanjutnya, kemajuan teknologi transportasi berpengaruh terhadap kelenturan arah pergerakan. Berbeda dengan struktur linier perjalanan kereta api, yang menghasilkan alternatif percabangan yang lebih sedikit dan keindahan alam yang kurang, arah perjalanan dengan kendaraan dapat lebih bervariasi. Transportasi udara, yang dapat bermanuver di sekitar sejumlah rintangan alam, dapat dianggap serupa (waktu yang lebih singkat).

3. Akomodasi

Ada dua jenis akomodasi: yang dirancang untuk penggunaan umum (seperti hotel, motel, penginapan, dan tempat berkemah liburan) dan yang dirancang khusus untuk individu guna mengakomodasi keluarga, teman, atau anggota asosiasi tertentu atau terbatas. Pilihan penginapan umum termasuk hotel, motel, penginapan, dan tempat berkemah liburan.

4. Fasilitas Pelayanan

Jumlah fasilitas dan layanan yang disediakan bertambah, dan tata letaknya menyesuaikan dengan dinamika bisnis pariwisata yang terus berubah. Layanan konsumen seperti makanan, minuman, dan makanan ringan pertama, diikuti oleh pedagang, pengrajin, dan penyedia layanan lainnya, kemudian pengecer barang konsumsi (seperti toko pakaian dan furnitur), dan terakhir penyedia keselamatan dan keamanan (seperti dokter, apotek, polisi, dan pemadam kebakaran) sebelum penjualan barang mewah lepas landas.

5. Infrastruktur

Infrastruktur diperlukan untuk mendukung layanan dan fasilitas yang ditawarkan. Selain membantu pertumbuhan usaha yang terkait dengan pariwisata, perbaikan infrastruktur membantu masyarakat lokal secara tidak langsung. Tidak hanya jalan, pelabuhan, kereta api, dan sebagainya yang sedang dibangun, tetapi air, listrik, dan sistem pembuangan limbah juga sedang dibangun sebagai bagian dari ini.

3. Objek Wisata dan Pengembangannya

Menurut (Fandeli, 2001), objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa objek wisata merupakan keadaan alam yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan.

Menurut Yoeti (2006) yang penting diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah yang menjadi tujuan wisata, agar dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial dalam macam-macam pasar, harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “something to see“. Artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata, yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan perkataan lain, daerah tersebut harus mempunyai daya tarik yang khusus, di samping itu harus mempunyai atraksi yang dapat dijadikan sebagai “entertainments” bila wisatawan datang kesana.
2. Objek wisata tersebut harus tersedia apa yang disebut istilah “ something to do”. Artinya, objek wisata tersebut banyak yang dapat di lihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di objek tersebut.

3. Objek wisata tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “something to buy”. Artinya, objek wisata tersebut harus tersedia fasilitas berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan masyarakat sebagai oleh-oleh. Fasilitas untuk berbelanja ini tidak hanya menyediakan barang-barang yang dapat dibeli, tetapi harus pula tersedia sarana-sarana pembantu lain untuk lebih memperlancar seperti bank, kantor pos dan lain-lain.

Dari pengertian pengembangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pengembangan pariwisata adalah suatu usaha yang telah direncanakan, terarah, untuk memperbaiki suatu tempat wisata menjadi lebih baik dari sebelumnya.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Angga Pradikta, 2013	Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli	Hasil studi menunjukkan strategi ekspansi yang kuat untuk sektor pariwisata Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah; ia telah memanfaatkan kekuatan dan peluangnya sebaik mungkin. Ini dapat dilihat

		Daerah (Pad) Kabupaten Pati	dengan berkonsultasi dengan Matriks Strategi Besar. Ada persimpangan 1:39:91 di kuadran I gambar. Posisi Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah pada kuadran ini dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemungkinan waduk. Rata-rata 0,000136 persen pendapatan daerah berasal dari Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah antara tahun 2007 hingga 2011.
2.	Mifta Damai Riyaningtyas, 2014	Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata Di Kabupaten Pacitan	Pemerintah daerah di wilayah Pacitan masih banyak yang belum membangun dan mengelola tempat-tempat wisata karena wajib lebih mengutamakan produk-produk pariwisata. Kawasan Goa Gong dan Pantai Klayar yang keduanya telah ditetapkan oleh

			<p>Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menjadi fokus utama pembangunan pada tahun 2013 dan 2014. Lokasi wisata lainnya yang sebagian besar berada di bagian timur Pacitan, belum dikembangkan karena Goa Gong dan Pantai Klayar tetap menjadi tujuan utama pengembangan pariwisata di pulau tersebut. Apalagi obyek wisata yang akan dilintasi Jalur Lintas Selatan saat ini belum memiliki fasilitas dasar pariwisata, artinya jika dikembangkan akan membutuhkan perhatian khusus.</p>
3.	Dewi Kusuma Sari, 2011	<p>Pengembangan Pariwisata Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang</p>	<p>Sebagai salah satu pilihan yang dikaji untuk pengembangan Pantai Sigandu secara keseluruhan, pengembangan Pantai Sigandu sebagai destinasi</p>

			<p>wisata primadona Kabupaten Batang diberi bobot 0,128. Bobot 1,108 diberikan untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), sedangkan bobot 0,103 diberikan untuk memberikan kemudahan dan kemudahan kepada investor.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan table di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan dipermasalahan penelitian, sedangkan perbedaan yang dimiliki yaitu lokasi dan waktu penelitian yang dilaksanakan berbeda.

G. Kerangka Konsep

Untuk memudahkan dalam suatu penelitian harus dirumuskan suatu kerangka konsep yang bertujuan untuk menentukan arah penelitian menjadi jelas. Kerangka konseptual ialah uraian sementara terhadap gejala yang menjadi objek suatu penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah diuraikan sebelumnya atau bagaimana teori berkaitan dengan beberapa aspek yang telah teridentifikasi menjadi persoalan yang penting.

Gambar 1. Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif, memberikan gambaran objek berupa fakta-fakta dan kata-kata tertulis maupun lisan yang tidak diperoleh dalam bentuk hitungan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menyusun data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang pada objeknya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dilakukan peneliti adalah :

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelitian (lapangan) seperti wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang telah diperoleh atau dikumpulkan dari jurnal, laporan penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan undang-undang saat ini untuk mendapatkan informasi terkait Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Marumasa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melakukan pengamatan langsung di lapangan. Peneliti melaksanakan pengamatan tentang bagaimana objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari seorang responden yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan jawaban langsung. Peneliti melakukan tanya jawab kepada staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa gambar-gambar pada saat pengumpulan data di lapangan. Metode ini dapat digunakan untuk

mencari data tentang objek atau variabel tertentu dalam tesis, catatan, buku, dan majalah.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian menurut Afrizal (2016:139), adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara mendalam tentang dirinya, orang lain, peristiwa, atau objek. Adapun informan penelitian yaitu orang memiliki pengetahuan tentang keadaan Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba. Adapun informannya sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pembangunan Destinasi Pariwisata
2. Kepala Desa Darubiah
3. Pengelola/stakeholders
4. Masyarakat
5. Pengunjung/wisatawan

F. Teknik Analisa Data

Penulis menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, dan ada banyak langkah yang digunakan untuk menganalisis data. Analisis ialah suatu proses untuk mengklasifikasikan data dan memilahnya ke dalam keputusan yang ada guna menghasilkan hasil yang sejalan dengan data yang tersedia.

a. Reduksi kata

Memilih komponen yang paling signifikan dari keseluruhan, meringkasnya, dan berfokus pada isu-isu yang paling relevan adalah bagian dari proses reduksi data. Data yang berkurang dapat membantu peneliti memperoleh data tambahan dengan menjelaskan hal-hal secara lebih eksplisit.

b. Penyajian data

Tulisan deskriptif biasa digunakan untuk menyajikan hasil penelitian kualitatif. Informasi yang diperoleh di lapangan disajikan dalam teks seakurat mungkin, tanpa tambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang sedang dikerjakan. Peneliti bertujuan untuk memberikan fakta yang tepat dan benar terkait dengan gaya kepemimpinan pada fungsi administrasi sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Sebuah kesimpulan tanpa cacat terbentuk setelah semua fakta terkait dengan analisis gaya kepemimpinan pada kegiatan administrasi di Kantor Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Data dapat pula dibuat dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan gagasan yang mendukung dan penting bagi penelitian untuk sampai pada suatu kesimpulan yang konsisten dengan tujuan penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Memperluas partisipasi, mempertahankan observasi, triangulasi, peer check, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, dan konfirmasi dengan peserta penelitian adalah semua metode yang digunakan untuk menilai kualitas data. (Moleong 2006:327). Kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan/keandalan, dan kepastian dapat dikonfirmasi adalah empat kriteria yang digunakan untuk menguji validitas data (Sugiyono, 2013).

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografi terletak pada $5^{\circ}20'00''$ sampai $5^{\circ}40'00''$ LS dan $119^{\circ}58'00''$ sampai $120^{\circ}28'00''$ (Greenwich). Daerah ini berada di sebelah tenggara Kota Makassar, terbagi atas 10 wilayah kecamatan dan terdiri atas 24 kelurahan serta 102 desa; dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai

Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone

Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

a. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,67 km² atau sekitar 2,5persen dari luas Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 386.239 jiwa dan kepadatan penduduk 2.918 jiwa/km² dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 0,61 %, kepadatan penduduk terpadat di Wilayah Kecamatan Ujungbulu dan terjarang di Kecamatan Kindang. Pola curah hujan tahunan umumnya bimodal, dimana musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juli – Oktober dan musim hujan pada bulan Desember – Mei, dengan tingkat curah hujan tahunan berkisar antara 1400–2500 mm/tahun. Pada musim hujan angin

bertiup dari Timur ke Barat sedangkan pada musim kemarau bertiup dari Barat ke Timur.

Table 2. Luas Wilayah dan Panjang Garis Pantai Kecamatan Bonto

Bahari

No	Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Panjang Garis Pantai (Km)
1.	Gantarang	25,93	10,0
2.	Bonto Bahari	91,60	48,2
3.	Ujung Loe	53,37	11,5
4.	Bonto Tiro	10,55	10,6
5.	Herlang	25,21	16,0
6.	Kajang	21,50	20,2
7.	Ujung Bulu	9,71	11,5
Pesisir dan Laut Kab. Bulukumba		237,87	128,0

Sumber : RTRW Kab. Bulukumba 2010-2030

b. Wilayah bagian pesisir dan laut

Kabupaten Bulukumba dengan panjang pantai \pm 132,5 km, termasuk perairan pantai sampai batas kearah laut sejauh 4 mil laut dari garis pantai (UU No. 22 Tahun 1999). Kondisi fisik wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bulukumba mulai dari wilayah administrasi Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Ujung Loe. Luas wilayah dan panjang garis pantai dan laut Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada table.

c. Topografi

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

d. Ketinggian

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi 37able37 berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.

e. Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah.

Kabupaten Bulukumb berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bonto Bahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah.

Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- a) Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bonto Bahari
- b) Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro.

- c) Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.
- d) Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

f. Jenis tanah

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

g. Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha.

I. Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba

1) Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (skateholder) yang ada di kabupaten Bulukumba. Visi Kabupaten Bulukumba tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang produktif, yang berkarakter kearifan 4Iable menuju Bulukumba maju dan sejahtera”.

Perumusan terhadap visi dimaksud sebagaimana di bawah ini:

Visi Kabupaten Bulukumba tersebut berpedoman pada visi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2021 – 2026 yaitu “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas berdayasaing”.

2) Misi

- a. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat
- b. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
- c. Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor
- d. Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
- e. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
- f. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
- g. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
- h. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
- i. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis investasi dan Bantuan Pemerintah
- j. Membina Generasi Muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
- k. Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- l. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

2. Gambaran Umum Desa Darubiah

Desa Darubiah merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Terletak kurang lebih antara $5^{\circ} 25' 40,80''$ LS- $4^{\circ} 23' 27,24''$ LS dan $102^{\circ} 8' 21,4''$ BT – $102^{\circ} 10' 7,32''$ BT Secara 43able43ve43ative, wilayah Desa Darubiah memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Ara
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Bira
Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Tanah Lemo

Luas wilayah Desa Darubiah adalah $16,85 \text{ km}^2$ yang secara 43able43ve43ative Pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga) dusun masing-masing :

1. Dusun Biralohé
2. Dusun Dauhé
3. Dusun Kasuso

Sebagaimana wilayah tropis, Desa Darubiah mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Jarak Pusat Pemerintahan Desa Darubiah dengan ibukota Kecamatan 9 km dan ibukota Kabupaten 38 km. Kondisi Topografi Daratan Desa Darubiah 43able43ve berbukit dengan ketinggian sekitar 0-50 m diatas permukaan laut dan keadaan suhu udara rata-rata sebesar 25° - 38° .

Penggunaan sumberdaya lahan untuk bangunan di Desa Darubiah beraneka ragam yakni Lahan Perkantoran seluas ± 3 ha, Lahan Sekolah seluas ± 3 ha, Tempat Peribadatan seluas ± 2 ha, Lahan Perkebunan seluas ± 125 ha, Lahan Pemukiman seluas ± 420 Ha, dan Lahan Fasilitas Umum seluas ± 187 ha.

Desa Darubiah merupakan wilayah paling potensial untuk Industri Kerajinan, Perdagangan, Perkebunan dan Pariwisata. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis desa serta masyarakatnya, dukungan Pemerintah Daerah untuk pengembangan potensi Perindustrian dan Pertukangan.

Berdasarkan kondisi ini, maka akan dijabarkan Permasalahan, Potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 (enam) tahun.

a. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Darubiah adalah 2.792 jiwa. (laki-laki 1.432 jiwa dan perempuan 1.360 jiwa) dengan komposisi tersaji dalam table berikut :

Tabel 3. Tabel Demografi

Jenis Kelamin	Dusun Biralohé	Dusun Dauhé	Dusun Kasuso	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) + (c) + (d)
Laki-laki	405 jiwa	525 jiwa	502 Jiwa	1.432 jiwa
Perempuan	401 jiwa	426 jiwa	533 Jiwa	1360 jiwa
Jumlah Jiwa	806 jiwa	951 jiwa	1035 Jiwa	2.792 jiwa
Jumlah KK	242 KK	309 KK	283 KK	834 KK

Sumber : Profil Desa Darubiah Tahun 2020

b. Visi dan Misi Desa Darubiah

1) Visi

Visi Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Darubiah dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Darubiah tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Desa Darubiah Yang Lebih Maju, Berprestasi, Berbudaya Dan Kreatif Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kemampuan Ekonomi Dan Kepedulian Sosial Masyarakat Dan Pemantapan Pembangunan Diberbagai Bidang Berlandaskan Religious, Kultural Dan Budaya Daerah “

Visi tersebut memiliki 5 (lima) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :

1. Maju, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Darubiah yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan

terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder.

2. Berprestasi, yaitu kondisi pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas.
3. Berbudaya dan Kreatif, yaitu menumbuhkembangkan budaya dan semangat masyarakat desa dengan mengasah kreatifitas masyarakat sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kemampuan Ekonomi Dan Kepedulian Sosial Masyarakat, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Darubiah yang memiliki kemandirian dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Pemantapan Pembangunan Diberbagai Bidang Berlandaskan Religious, Kultural Dan Budaya Daerah, yaitu target dan sasaran prioritas Pembangunan Desa di berbagai bidang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa yang menunjang peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang berlandaskan religious.

2) Misi

Misi Untuk mencapai Visi Terwujudnya Desa Darubiah Yang Lebih Maju, Berprestasi, Berbudaya Dan Kreatif Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kemampuan Ekonomi Dan Kepedulian Sosial Masyarakat Dan Pemantapan Pembangunan Diberbagai Bidang Berlandaskan Religious, Kultural Dan Budaya Daerah, maka Desa Darubiah telah menetapkan misi sebagai berikut:

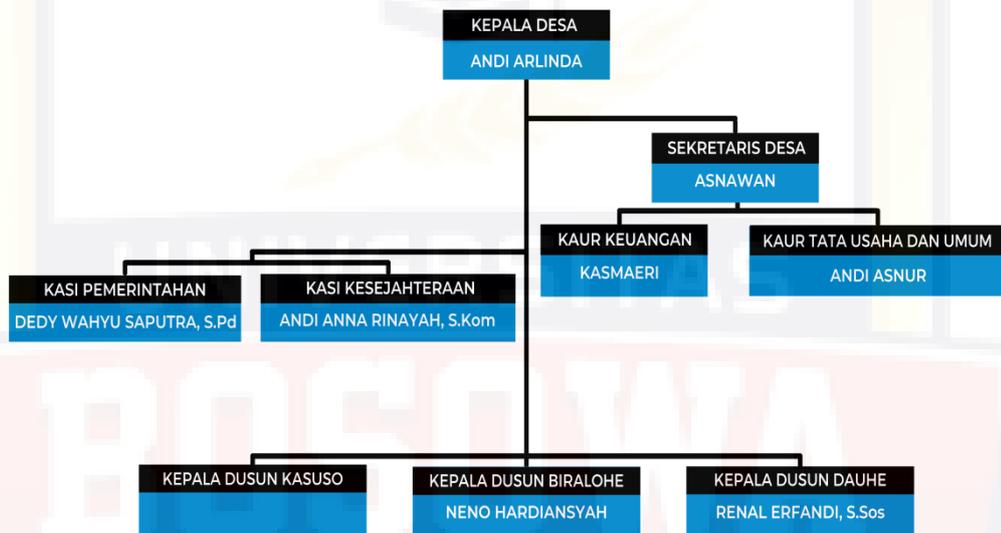
1. Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia bagi Aparatur pemerintahan Desa
3. Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik diberbagai bidang
4. Menumbuh kembangkan dan melestarikan seni dan budaya
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pemerintahan Desa
6. Penertiban adminstrasi pemerintahan Desa
7. Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan Desa
8. Menggali potensi desa dalam rangka peningkatan PAD
9. Meningkatkan kerukunan kerjasama antar lembaga Desa
10. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemampuan daya saing social ekonomi

11. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.

c. Struktur Organisasi

Gambar 3. Struktur Organisasi Desa Darubiah

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DESA DARUBIAH KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**



3. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

a. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

(1) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Meningkatkan Daya Saing Sektor Pariwisata yang Mandiri dan Produktif.

(2) Misi Pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

a. Misi Daya Saing Pariwisata:

1. Mewujudkan pariwisata daerah berdaya saing global melalui penyiapan infrastruktur secara berkelanjutan

2. Mewujudkan pembangunan pariwisata berbasis teknologi

b. Misi Mewujudkan Kemandirian Pariwisata:

1. Mewujudkan pariwisata bulukumba berbasis potensi dan keunikan objek wisata
2. Mewujudkan pembangunan pariwisata berdasarkan segmentasi
3. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
4. Mewujudkan pembangunan pariwisata berbasis pelibatan masyarakat lokal

c. Misi Mewujudkan Produktifitas Kepariwisataan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dalam kerangka peningkatan angka kerja
2. Mewujudkan koordinasi antar sektor dan lintas sektor baik di lingkup pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap pembangunan pariwisata
3. Mewujudkan struktur ruang dan kawasan strategis pariwisata kabupaten bulukumba

b. Tugas Pokok Fungsi Bidang Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut merupakan uraian dari fungsi dan tugas pokok bidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

a) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

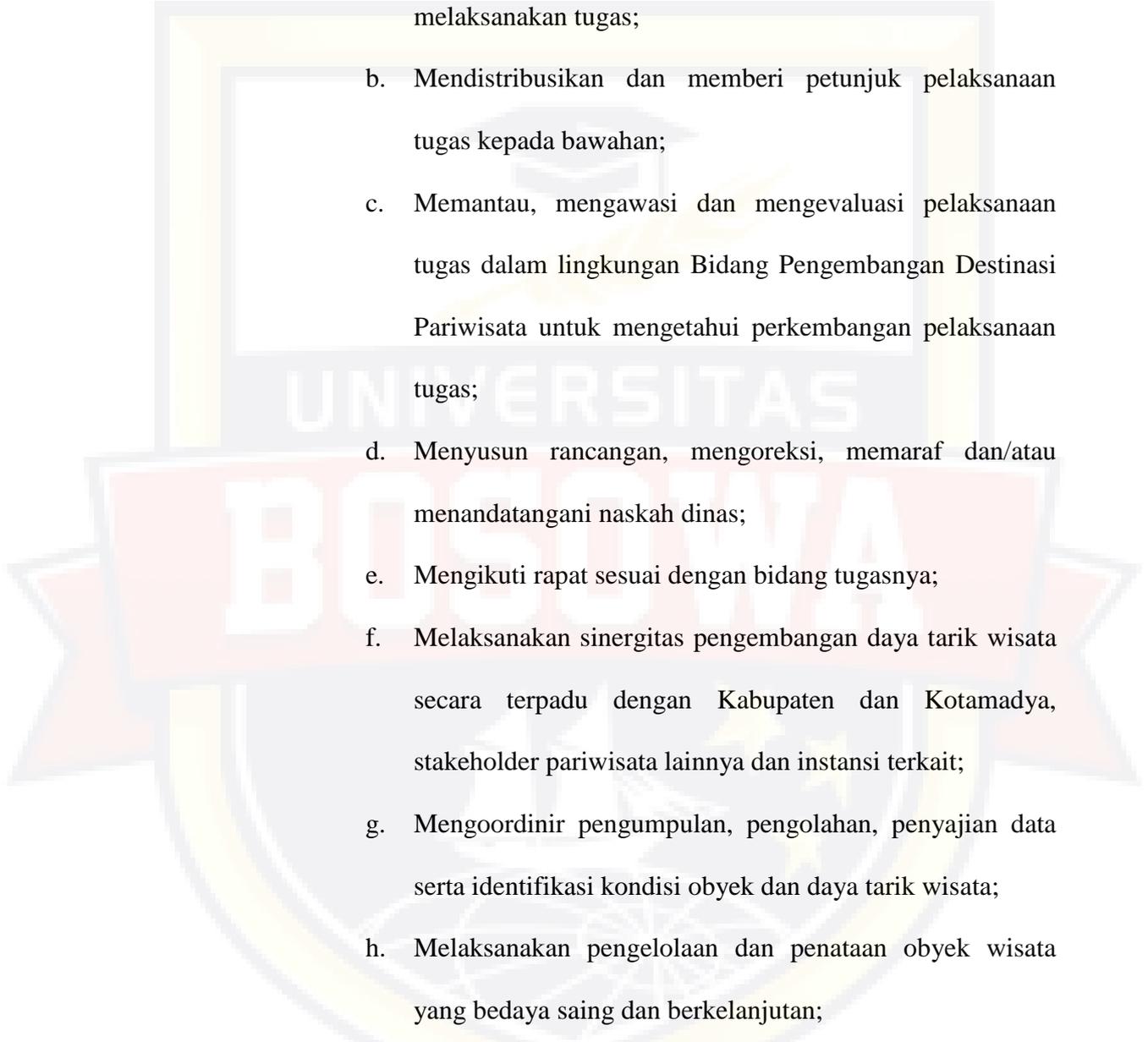
1. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh

Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan destinasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, Kepala Bidang Pengembangan

Destinasi Pariwisata melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Parwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Pelaksanaakn evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan Kabupaten dan Kotamadya, stakeholder pariwisata lainnya dan instansi terkait;
 - g. Mengoordinir pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta identifikasi kondisi obyek dan daya tarik wisata;
 - h. Melaksanakan pengelolaan dan penataan obyek wisata yang budaya saing dan berkelanjutan;
 - i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata;
 - j. Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana obyek wisata unggulan daerah;

- k. Meningkatkan sarana dan fasilitas pada destinasi pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kenyamanan wisatawan;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran obyek dan usaha pariwisata;
- m. Melaksanakan pengendalian dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat pembangunan sarana dan prasarana wisata;
- n. Mengevaluasi data hasil kajian obyek wisata dan daya tarik serta usaha pariwisata;
- o. Melaksanakan pengendalian lingkungan pada obyek dan daya tarik wisata;
- p. Mengoordinasikan penyiapan data kajian dan evaluasi dampak lingkungan obyek wisata;
- q. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian obyek dan daya tarik wisata;
- r. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian intern terhadap usaha sarana dan jasa pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. Melaksanakan proses penetapan kebijakan kendali mutu (supervise, pelaporan, evaluasi dan monitoring) kegiatan pengendalian usaha jasa pariwisata;

- t. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
- u. Mengoordinasikan penyiapan segala hak yang terkait dengan pemberian rekomendasi persyaratan dasar untuk klasifikasi/reklasifikasi usaha kepariwisataan;
- v. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata meliputi pengembangan dan pengelolaan daya tarik pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, serta pengendalian obyek dan usaha pariwisata;
- w. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervise dan evaluasi kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
- x. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- y. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya

Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan

kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang pemasaran, pengembangan

sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang

menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana yang dimaksud, Kepala Bidang Pemasaran,

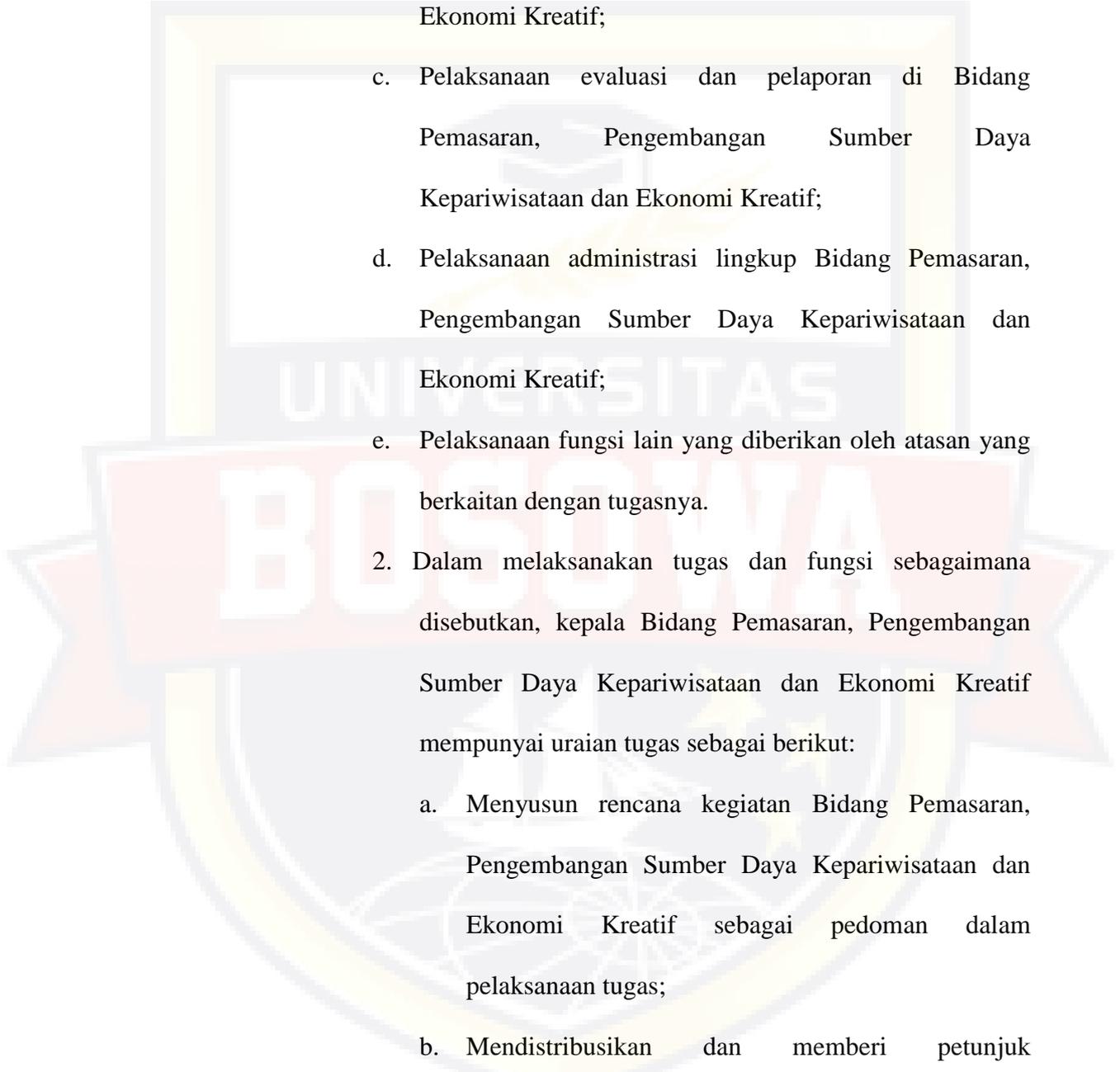
Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi

Kreatif melaksanakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemasaran,

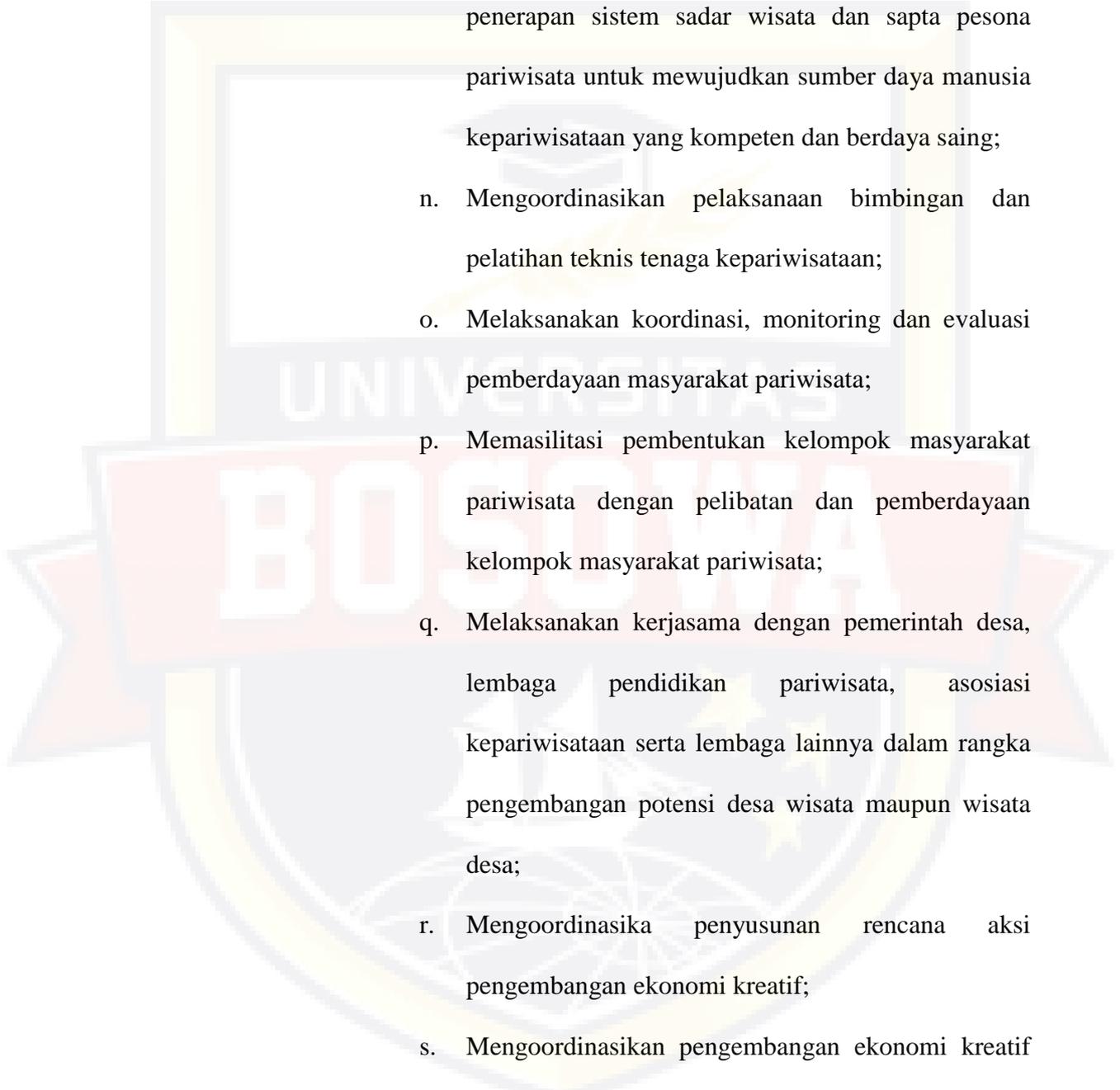
Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan

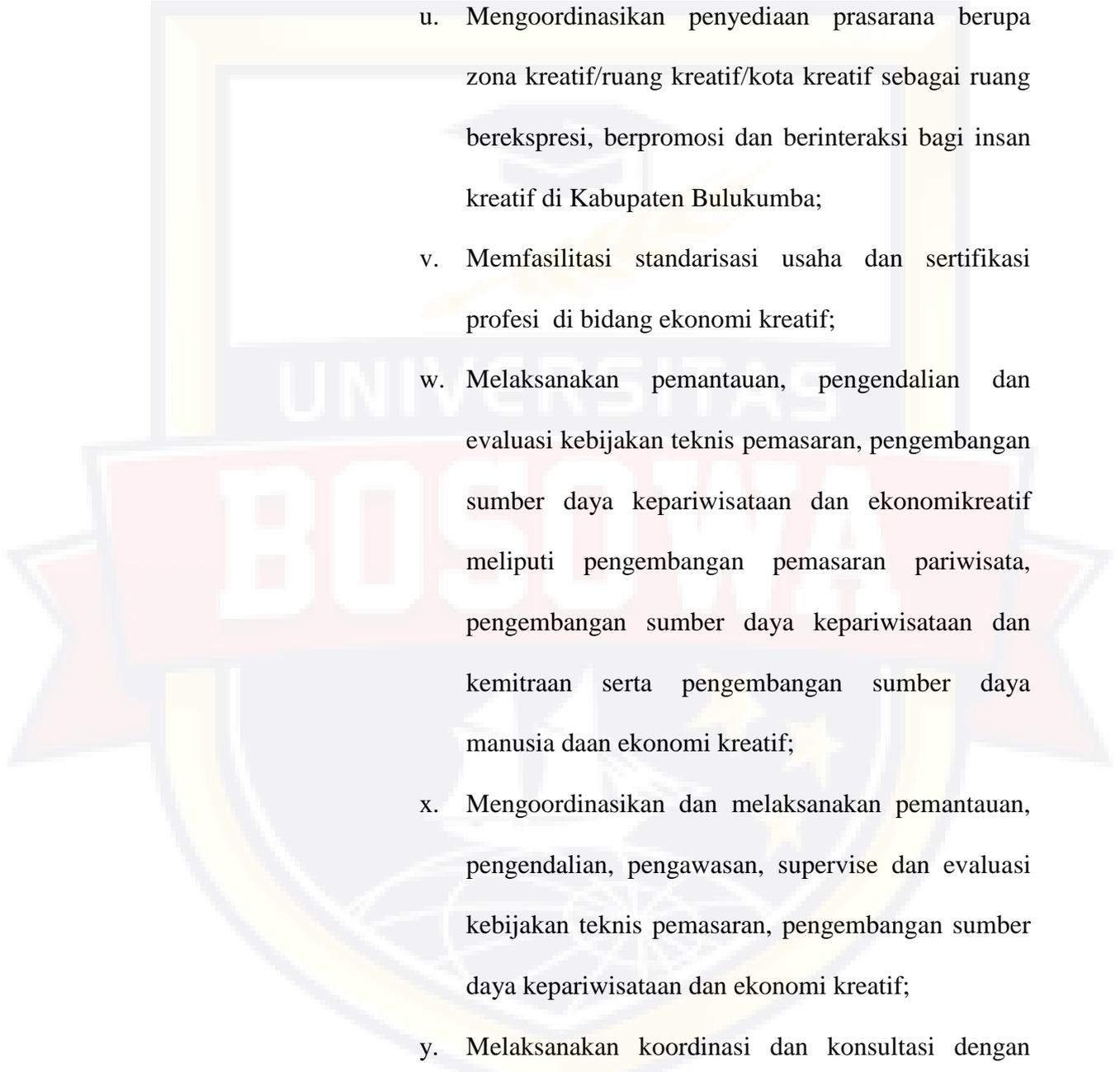
Ekonomi Kreatif;

- 
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. Pelaksanaan administrasi lingkup Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan, kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang

Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan sarana pengembangan promosi dan pemasaran;
- g. Mengoordinasikan pemasaran pariwisata melalui pameran, event promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- h. Mengoordinasikan penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik di dalam maupun di luar negeri;
- i. Mengoordinasikan pengelolaan pengembangan kerjasama dan pemasaran produksi kesenian dan kearifan lokal;
- j. Mengevaluasi pelanggaran pengembangan kerjasama, event dan daya tarik wisata;
- k. Melaksanakan evaluasi dan analisis perkembangan pasar wisata dalam dan luar negeri;
- l. Menganalisa pola perjalanan/kunjungan wisatawan secara individual atau kelompok;

- 
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dalam rangka penerapan sistem sadar wisata dan sapta pesona pariwisata untuk mewujudkan sumber daya manusia kepariwisataan yang kompeten dan berdaya saing;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis tenaga kepariwisataan;
- o. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- p. Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pariwisata dengan pelibatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pariwisata;
- q. Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan pariwisata, asosiasi kepariwisataan serta lembaga lainnya dalam rangka pengembangan potensi desa wisata maupun wisata desa;
- r. Mengoordinasikan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- s. Mengoordinasikan pengembangan ekonomi kreatif melalui dukungan fasilitas menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;

- 
- t. Melaksanakan fasilitas pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif;
- u. Mengoordinasikan penyediaan prasarana berupa zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten Bulukumba;
- v. Memfasilitasi standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
- w. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomikreatif meliputi pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan kemitraan serta pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- x. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervise dan evaluasi kebijakan teknis pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- y. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi pada Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- z. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan

1. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan kepramukaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang kepemudaan dan kepramukaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang kepemudaan dan kepramukaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pemuda;
- g. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor dan daya saing wirausaha pemula melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- h. Melaksanakan fasilitas pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda melalui penyelenggaraan perkemahan ilmiah remaja regional;
- j. Mengoordinasikan upaya peningkatan wawasan dan kreatifitas oemuda;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera;
- l. Mengoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten bulukumba;
- m. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten bulukumba;
- n. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis kepemudaan dan kepramukaan meliputi

pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervise dan evaluasi kebijakan teknis kepemudaan dan kepramukaan;
- p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- q. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang tenaga kerja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

d) Bidang Keolahragaan

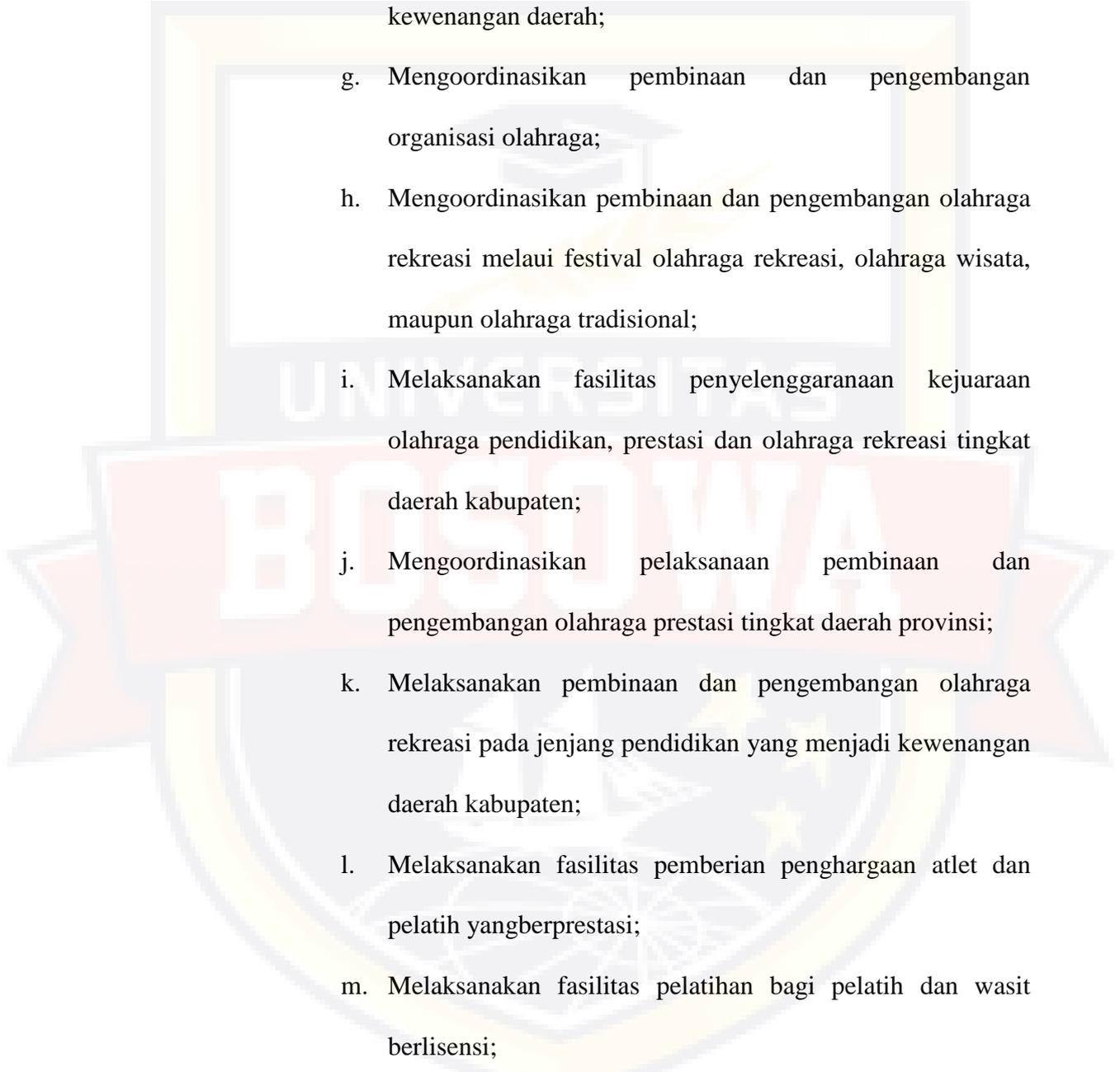
1. Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keolahragaan lingkup

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keolahragaan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keolahragaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keolahragaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keolahragaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Keolahragaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang keolahragaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang keolahragaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

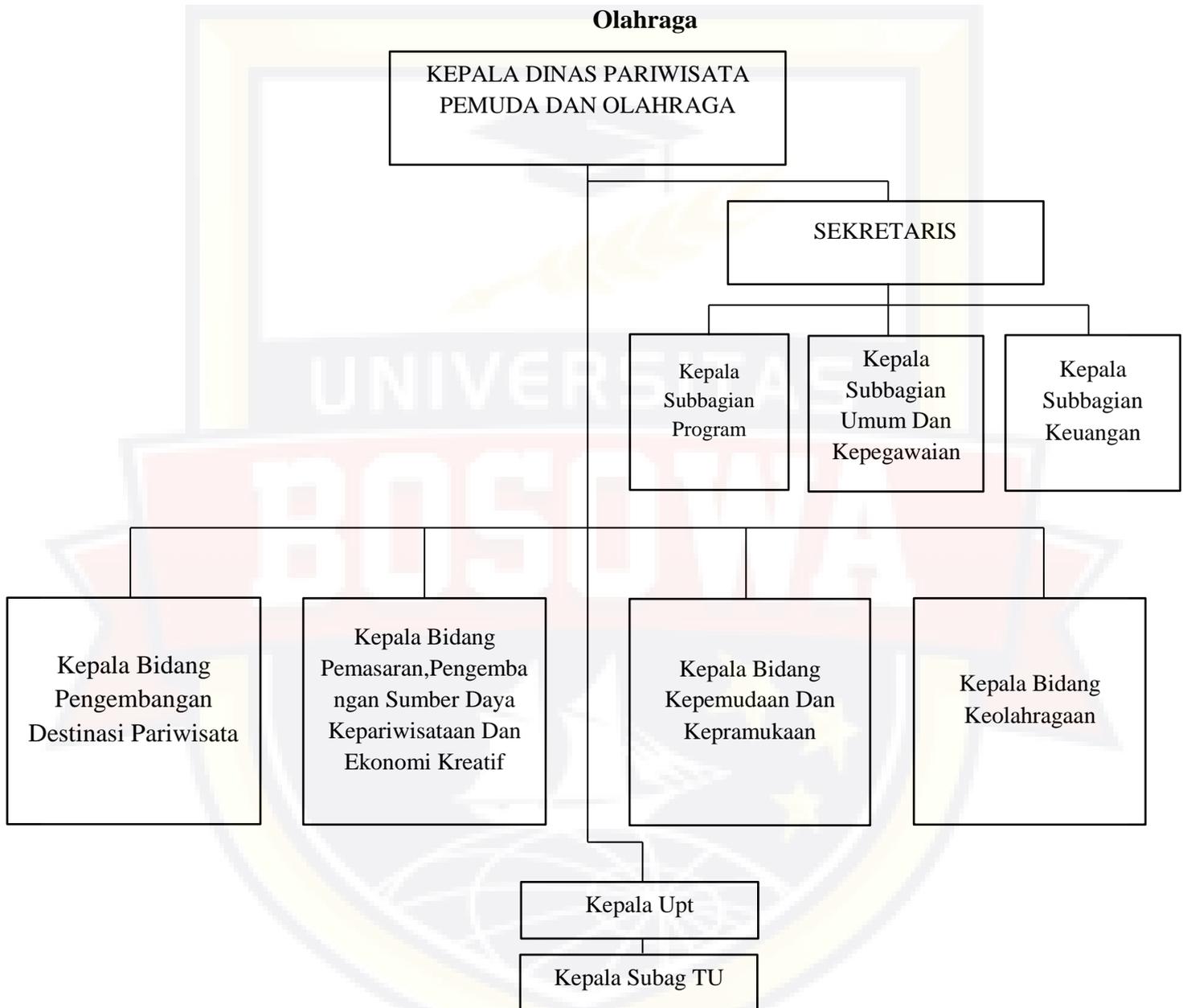
- 
- f. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga oendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- h. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi melalui festival olahraga rekreasi, olahraga wisata, maupun olahraga tradisional;
- i. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga pendidikan, prestasi dan olahraga rekreasi tingkat daerah kabupaten;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- l. Melaksanakan fasilitas pemberian penghargaan atlet dan pelatih yang berprestasi;
- m. Melaksanakan fasilitas pelatihan bagi pelatih dan wasit berlisensi;
- n. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis meliputi pembinaan keolahragaan,

peningkatan prestasi olahraga,serta pengembangan sarana dan prasarana olahraga;

- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis tenaga kerja;
- p. Melaksanakan kordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang keolahragaan;
- q. Menilai kinerja asn sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang keolahragaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Struktur Organisasi

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan



4. Identitas Informan

Dalam proses pengumpulan data, peneliti mendapatkan data yang diberikan oleh beberapa informan untuk dikumpulkan yang menyangkut dengan fokus penelitian yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85), *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

"*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu".

Maka penulis mendapatkan informasi dari beberapa informan yaitu, Kepala Bidang, Sekretaris Desa Darubiah, Pengelola, Masyarakat, dan Pengunjung. Untuk mengetahui keabsahan – keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan maka berikut adalah informasi mengenai informan sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Muh. Akil. S.Sos., M.Si adalah Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang menjabat sejak tahun 2022. Beliau adalah seorang lelaki yang berumur sekitaran 50 tahun. Kepala Bidang bertugas membantu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan destinasi pariwisata.

2. Sekretaris Desa Darubiah

Asnawan adalah Sekretaris Desa Darubiah yang menjabat pada tahun 2020 sampai sekarang. Dan tahun ini beliau sedang menjalankan

pemerintahan di tahun kedua. Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Adapun tugas pokok dari sekretaris desa sebagai berikut :

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

1. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 2. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 3. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Arma Yusi adalah seorang lelaki yang berumur sekitar 40 tahun yang berprofesi sebagai pengelola di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba. Bagi peneliti pendapat dari salah satu pengelola sangat membantu dalam mengetahui informasi mengenai Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba.

4. Andi Arwin adalah seorang lelaki yang berumur sekitar 50 tahun yang sehari-harinya berprofesi sebagai seorang nelayan dan saat ini sedang membuat kapal fiberglass. Bagi peneliti pendapat dari seorang nelayan sangat membantu dalam mengetahui informasi-informasi yang ada dalam Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba.
5. Nurul Fitra adalah seorang pengunjung yang berasal dari Gowa berumur sekitar 20 tahun yang sedang berkunjung di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba. Bagi peneliti pendapat dari salah satu pengunjung sangat membantu dalam mengetahui informasi mengenai Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba.

B. Hasil Penelitian

1. Metode pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba

Mengenai metode pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba, maka berikut akan dibahas ke dalam beberapa indikator sebagai berikut :

a. Obyek dan daya tarik wisata

Ridwan (2012:5) mengemukakan pengertian objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pengertian daya tarik

wisata menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Objek dan daya tarik dapat dilihat dari potensi alam yang dimiliki Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba yang bisa dijadikan hiburan bagi wisatawan yang berkunjung. Untuk melihat bagaimana Objek dan daya tarik yang dimiliki Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba, maka peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku sebagai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai berikut :

“Kecamatan Bonto bahari merupakan kawasan strategis pengembangan pariwisata, ada beberapa kawasan bahari di Kabupaten Bulukumba salah satunya adalah marumasa, marumasa beda dari pantai-pantai lain seperti bira karena keindahannya itu pantai dan tebingnya”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas mengatakan bahwa Kecamatan Bonto Bahari merupakan kawasan strategi pengembangan pariwisata yang memiliki beberapa tempat wisata di Kabupaten Bulukumba. Salah satu objek wisata yang ada di Bonto Bahari ialah Pantai Marumasa, seperti yang dikatakan Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pembangunan Destinasi Pariwisata ialah yang menjadi daya tarik

dari Pantai Marumasa ini adalah keindahan pantai dan tebingnya yang beda dari pantai-pantai lainnya seperti Pantai Bira.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Asnawan selaku Sekretaris Desa Darubiah, berikut wawancaranya :

“Yang menjadi daya tariknya yaitu Pantai Marumasa memiliki spot tanjung untuk foto – foto kemudian pantainya yang berpasir putih, disatu sisi sekelompok nelayan masih melakukan aktivitas disana”. (wawancara Asnawan, 30 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas, mengatakan bahwa daya tarik yang dimiliki Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba adalah keindahan dari tanjungnya dan pantai yang berpasir putih. Disatu sisi juga beberapa sekelompok nelayan yang juga merupakan masyarakat setempat masih melakukan aktivitas disana, karena pantai ini merupakan lokasi pembuatan perahu dan kapal pinisi.

Untuk melihat objek dan daya tarik yang dimiliki Pantai Marumasa maka peneliti juga merasa penting untuk mengetahui secara langsung dari masyarakat setempat. Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Andi Arwin selaku nelayan

“Kalau daya tariknya dari ini Pantai Marumasa itu pantainya bagus, diapit dengan tebing kanan kiri”. (wawancara Andi Arwin, 30 Juli 2022)

Dari pernyataan di atas, bapak Andi Arwin selaku nelayan yang juga merupakan masyarakat setempat mengatakan bahwa daya tarik dari Pantai Marumasa ialah pantainya yang indah dan juga diapit dengan tebing dari sebelah kanan dan kiri yang di tengahnya merupakan pantai indah yang berpasir putih.

Berdasarkan dari hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi objek dan daya tarik yang dimiliki dari Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba ini memiliki keindahan pantainya yang berpasir putih yang menjadi beda dari pantai – pantai lain yang berada di Kecamatan Bonto Bahari. Dan juga memiliki dua tebing yang mengapit keindahan Pantai Marumasa berpasir putih, beberapa spot foto yang indah akan pemandangannya. Dimana yang menjadi objek dan daya tarik Menurut Suwanto (2004) mengatakan bahwa daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Hal-hal yang dimiliki oleh daya tarik wisata mencakup suatu unsur yang utama dalam menarik wisatawan untuk datang dan menikmati unsur tersebut.

b. Prasarana Wisata

Menurut Yoeti (2006:189) yang dimaksud dengan prasarana adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, terminal dan lain sebagainya menurut Suwanto (2004:21).

Menurut Warpani (2007) dalam Ghani (2017) prasarana pariwisata dikelompokkan menjadi tiga antara lain sebagai berikut.

1. Aksesibilitas

Merupakan daya hubung antar zona yang wujudnya berupa jalan raya dan jaringan angkutan. Aksesibilitas merupakan faktor penting dalam proses berwisata, tingkat kemudahan untuk menjangkau suatu kawasan wisata dilihat dari aksesibilitas yang berupa:

- a. Kondisi jalan raya
- b. Ketersediaan moda angkutan untuk menuju kawasan wisata tersebut

2. Utilitas

Utilitas memiliki beberapa kelompok antara lain sebagai berikut:

a. Listrik

Ketersediaan sumber energi listrik adalah prasyarat bagi pengembangan industri pariwisata. Tetapi harus memperhatikan penggunaannya. Tidak semua kawasan wisata membutuhkan listrik, atau hanya membutuhkan sedikit energi listrik.

- b. Air bersih
- c. Persediaan air minum
- d. Toilet
- e. Mushola atau Tempat Ibadah

3. Jaringan Pelayanan

- a. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pos kesehatan atau persediaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

b. Keamanan, dalam bentuk pos keamanan beserta pihak keamanan atau oknum petugas, agar terhindar dari tindakan kriminal selama berada di kawasan wisata

Untuk melihat prasarana yang ada di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba maka peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang mengatakan bahwa :

“Kalau kita berbicara infrastruktur yang ada di Pantai Marumasa ini , prasarana – prasarana yang lain memang sebenarnya Dinas Pariwisata belum sampai ke Marumasa untuk pembangunan infrastruktur sehingga prasarananya masih kurang, karena masalah anggaran”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas selaku Kepala Bidang Pembangunan Destinasi Pariwisata mengatakan bahwa saat ini prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih kurang, sampai saat ini Dinas Pariwisata belum memfokuskan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Pantai Marumasa.

Dalam pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu obyek wisata yang akan dapat meningkatkan daya tarik obyek wisata itu sendiri. Berikut adalah hasil wawancara bersama Bapak Asnawan selaku Sekretaris Desa Darubiah yang mengatakan bahwa :

“Fasilitas yang diberikan di pantai ini belum ada khusus untuk pantai marumasa”. (wawancara Asnawan, 30 Juli 2022)

Dari pernyataan yang dikatakan Bapak Asnawan selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa sejauh ini, fasilitas belum ada sama sekali diberikan oleh Pemerintah di Pantai Marumasa. Sehingga prasarananya masih kurang, akses jalan menuju pantai juga belum teraspal.

Untuk melihat kondisi yang ada di Pantai Marumasa maka peneliti tertarik untuk melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Darubiah. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Andi Arwin selaku nelayan yang mengatakan bahwa :

“Kalau kita lihat jalan menuju pantai ini belum teraspal, masih ada bebatuannya, tidak ada angkutan umum yang masuk ke pantai, disini tersedia ada toiletnya”. (wawancara Andi Arwin, 30 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas mengatakan bahwa, prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih belum memadai. Kondisi jalan masuk belum diaspal dan juga ketersediaan untuk menuju kawasan wisata tersebut belum ada sama sekali. Yang tersedia di kawasan tersebut terbatas seperti toilet dan air bersih.

Berdasarkan dari hasil wawancara, pengamatan analisa yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa ketersediaan prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih kurang. Dinas Pariwisata belum memberikan fasilitas sama sekali di Pantai Marumasa, sehingga ketersediaan seperti pelayanan kesehatan, pos keamanan, serta tempat ibadah belum tersedia. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi

Pariwisata, anggaran yang diberikan untuk membangun infrastruktur di Pantai Marumasa belum ada, sehingga prasarananya masih sangat minim. Beberapa yang hanya tersedia seperti toilet, warung, air bersih. Kondisi jalan masuk di pantainya belum diaspal dan juga ketersediaan untuk menuju kawasan wisata Pantai Marumasa ini belum ada sama sekali, hanya kendaraan pribadi yang dapat menuju kawasan wisata tersebut.

Hal ini juga belum sesuai dengan teori Arikunto dalam Arioanto (2008) berpendapat, fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Sehingga prasarana yang berperan menjadi penunjang di Pantai Marumasa masih sangat minim sekali.

c. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan ialah hotel, biro perjalanan, balai transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya menurut Suwanto (2004).

Menurut Yoeti dalam Ghani (2017), sarana pariwisata terbagi menjadi 3 kelompok, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sarana Pokok Pariwisata(main tourism superstructure) Sarana pokok merupakan sarana terpenting dalam pariwisata karena sarana pokok

adalah sarana dimana wisatawan tergantung kepada sarana tersebut.

Sarana pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Travelagent
 - b. Tour operator
 - c. Angkutan wisata
 - d. Rumah makan
 - e. Akomodasi
 - f. Objek wisata
 - g. Atraksi wisata
2. Sarana Pelengkap Pariwisata (Supplementing Tourism Superstructure)

Sarana pelengkap pariwisata merupakan sarana pelengkap sarana pokok. Sarana pelengkap adalah sebuah sarana atau fasilitas rekreasi yang memiliki fungsi selain menjadi pelengkap sarana pokok namun dapat membuat wisatawan dapat tinggal lebih lama pada suatu daerah tujuan wisata. Berikut merupakan fasilitas yang termasuk kedalam sarana pelengkap pariwisata:

- a. Sarana Olahraga
 - b. Sarana pariwisata sekunder, dan amusement lainnya
3. Sarana Penunjang Kepariwisata (Supporting Tourism Superstructure) Sarana penunjang pariwisata merupakan sarana dimana wisatawan dapat melakukan kegiatan perbelanjaan dan mengeluarkan uangnya lebih banyak di tempat wisata yang dikunjungi.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai berikut :

“ Untuk sarana – sarana yang lain memang sebenarnya Dinas Pariwisata belum memberikan di Pantai Marumasa karena kurangnya anggaran”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas mengatakan bahwa sarana yang ada saat ini di Pantai Marumasa belum ada sama sekali diberikan dari Dinas Pariwisata. Masih kurangnya sarana yang ada di Pantai Marumasa, sehingga fasilitas yang ada di pantai masih kurang untuk wisatawan.

Adapun wawancara bersama Bapak Arma Yusi selaku pengelola dan juga masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah tidak ada yang diberikan sama sekali fasilitas jadinya masing – masing yang kelola”. (wawancara Arma Yusi, 1 Agustus 2022)

Dari pernyataan di atas, maksud dari Bapak Arma yusi ialah belum ada fasilitas baik itu sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah di Pantai Marumasa, sehingga keterbatasan sarana yang menjadi pelengkap yang dapat membuat wisatawan nyaman berada di kawasan wisata masih kurang dan pengelolaannya masih bersifat pribadi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Andi Arwin selaku nelayan dan juga masyarakat yang mengatakan bahwa :

”Kalau sekarang tidak adapi diberikan juga dari pemerintah, pengelolaannya masih sendiri – sendiri seperti spot fotonya, hiasan

yang ada di tebingnya masih dibuat sendiri, jadi disini yang ada seperti warung saja”. (wawancara Andi Arwin, 30 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas, mengatakan bahwa sarana yang diberikan pemerintah belum diberikan di Pantai Marumasa, sehingga untuk kelengkapan fasilitas di pantai dikelola sendiri oleh masyarakat setempat tanpa ada campur tangan pemerintah sama sekali. Adapun yang tersedia hanya warung yang menjual makanan ringan saja dan seperti hiasan di tebing yang menjadi spot foto untuk wisatawan yang berkunjung.

Berdasarkan dari hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa bahwa sarana yang ada di Pantai Marumasa juga masih kurang sehingga yang mengelola hanya masyarakat setempat belum ada campur tangan pemerintah sama sekali. Pemerintah belum memberikan sarana karena kurangnya anggaran sehingga untuk memberikan fasilitas di Pantai Marumasa belum ada sama sekali. Hal ini sesuai dengan teori Nanik Darsini (2014), dalam menyediakan sarana memang harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar dapat berjalan dengan efektif. Indikator yang dikemukakan adalah : 1. Lokasi; 2. Infrastruktur; 3. Perabot; dan 4. Peralatan. Sarana yang ada di Pantai Marumasa seperti perabot dan peralatan lain yang berada di tebing sudah ada dan itupun dikelola secara pribadi.

d. Tata laksana dan infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi saran dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan di bawah tanah, seperti sistem pengairan, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai, sistem komunikasi, sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan, akan meningkatkan daya tarik suatu obyek wisata menurut Suwantoro (2004).

Infrastruktur merupakan prasarana umum, mencakupi hal-hal sebagai berikut sistem penyediaan air bersih, tenaga listrik, jalan dan jembatan, pelabuhan, airport, terminal atau stasiun kereta api (Bunaken, Bunaken, & Kota, 2007). Sedangkan definisi lain infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembungan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, menurut American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R., 2005). Berikut hasil wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si, selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mengatakan bahwa :

”Sejauh ini fasilitas atau infrastruktur yang diberikan Dinas Pariwisata belum ada sama sekali, karena kenapa, karena belum adanya anggaran sehingga Dinas Pariwisata belum memfokuskan

untuk memberikan fasilitas di Pantai marumasa”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas, mengatakan bahwa sejauh ini Dinas Pariwisata belum memfokuskan di Pantai Marumasa untuk membangun infrastruktur sehingga fasilitas yang ada disana masih sangat minim sekali untuk digunakan wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata. Masih kurangnya anggaran untuk membangun infrastruktur di Pantai Marumasa sehingga masih terhambat untuk memiliki fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Arma Yusi selaku salah satu pengelola di Pantai Marumasa mengatakan bahwa:

“Seperti yang saya katakan tadi, fasilitas yang diberikan belum ada, jadi pembangunan yang diberikan belum ada sama sekali”. (wawancara Arma Yusi, 1 Agustus 2022)

Dari pernyataan yang dikatakan Bapak Arma Yusi selaku salah satu pengelola di Pantai Marumasa bahwa belum juga ada pembangunan dari pemerintah yang diberikan di Pantai Marumasa. Selanjutnya, adapun peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Andi Arwin selaku nelayan dan masyarakat mengatakan bahwa.

“Belum ada sama sekali yang diberikan, jadinya masyarakat yang mengelola sendiri”. (wawancara Andi Arwin, 30 Juli 2022)

Dari pernyataan yang dikatakan Bapak Andi Arwin, ialah belum juga sama sekali diberikan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk diberikan wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa saat ini pemerintah maupun pemerintah daerah belum memberikan fasilitas – fasilitas di Pantai Marumasa sehingga infrastruktur yang ada di Pantai Marumasa belum ada, seperti akses jalan belum teraspal dan ketersediaan seperti tempat pembuangan sudah ada dan itu dikelola secara pribadi. Pengelolaan masih bersifat alami tanpa ada campur tangan pemerintah, karena masih kurangnya anggaran sehingga fasilitas yang ingin diberikan masih terhambat. Hal ini belum sesuai dengan teori Menurut N. Gregory Mankiw “2003”. Dalam ilmu ekonomi, arti infrastruktur ialah wujud modal publik “*public capital*” yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Dukungan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba

Mengenai dukungan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba, maka berikut akan dibahas ke dalam beberapa indicator sebagai berikut :

a. Koordinasi

Menurut Sutarto (2006:145- 146) koordinasi sebenarnya dapat dipakai satu istilah yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian antar bagian, keseimbangan antar bagian maupun sinkronisasi semuanya berdasarkan keselarasan. Atas dasar itu,

koordinasi dapat berasaskan bahwa di dalam organisasi harus ada keselarasan aktivitas antar satuan organisasi akan sulit untuk dapat tercapainya keteraturan kegiatan dengan tertib dalam upaya untuk meraih tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga tersebut. Peningkatan koordinasi diperlukan supaya dalam pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan lebih lancar dan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Berikut wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si, yang mengatakan bahwa :

“Pengelolaan disana masih ke pelaku – pelaku usaha, jadi mereka yang secara intens melakukan kegiatan promosi dan lain – lain, sejauh ini memberikan dukungan dalam perkembangan sdmnya, kita tetap melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah, apa kendalanya yaitu anggaran” (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas mengatakan bahwa pengelolaan di Pantai Marumasa masih dilakukan oleh pelaku – pelaku usaha dari masyarakat setempat. Sejauh ini dari Dinas Pariwisata dengan Pemerintah Daerah sering saling berkomunikasi dan membuat strategi dalam meningkatkan pengembangan objek wisata yang berada di Kecamatan Bonto Bahari salah satunya Pantai Marumasa. Tetapi saat ini masih belum adanya pergerakan dari pemerintah karena masih terkendala dimasalah anggaran, sehingga Pantai Marumasa terbengkalai begitu saja karena masih kurangnya anggaran. Dalam mengembangkan

suatu obyek kawasan wisata memang perlu adanya koordinasi antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah dan Masyarakat setempat dalam mengembangkan obyek wisata.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Asnawan selaku Sekretaris Desa Darubiah yang mengatakan bahwa :

“Sampai saat ini pantai marumasa dikelola secara personal oleh masyarakat yang punya lahan disana, disamping juga masyarakat lain yang diberi akses untuk berdagang atau menjual makanan ringan sehari-hari untuk pengunjung, dukungan yang diberikan saat ini masih dukungan moril untuk masyarakat disana, karena pemerintah desa belum terlibat langsung dalam penggunaan dana untuk pengembangannya, kami juga selalu saling berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata tentang bagaimana strategi kedepannya dalam mengembangkan wisata Pantai Marumasa ini”. (wawancara Asnawan, 30 Juli 2022)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa sejauh ini dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata masih dukungan moril. Belum adanya keterlibatan langsung dalam penggunaan dana dalam pengembangan obyek wisata.

Dan peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Darubiah. Berikut wawancara bersama Bapak Arma Yusi selaku pengelola yang mengatakan bahwa :

“Dukungan yang dikasi pemerintah saat ini hanya berupa saran – saran saja, belum ada bantuan terkait sarana dan prasarannya”. (wawancara Andi Arwin, 30 Juli 2022)

Dapat disimpulkan dari pernyataan informan di atas bahwa dukungan yang diberikan pemerintah masih dukungan moril belum materil. Karena seperti yang dikatakan Dinas Pariwisata masih kurangnya dimasalah anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa saat ini dukungan yang diberikan pemerintah masih dukungan moril. Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah dan Masyarakat saling berkomunikasi secara intens. Belum ada dukungan secara materil, karena masih kurangnya anggaran yang dimiliki sehingga prasarana dan sarannya masih kurang. Hal ini sesuai dengan teori Hasibuan (2009 : 85) berpendapat bahwa, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Motivasi

Untuk pengembangan pariwisata, peran pemerintah dinas pariwisata untuk memotivasi sangat diperlukan agar kepariwisataan itu dapat berjalan dan usaha pariwisata terus berjalan dengan lancar. Pemerintah desa dan masyarakat merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjaladengan baik menurut Pitana dan gayatri (2005). Berikut

wawancara bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mengatakan bahwa :

“Komunikasi dengan pemerintah daerah kita lakukan secara intens, memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan wisata di Pantai Marumasa”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Dinas Pariwisata telah memotivasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan destinasi kawasan wisata Pantai Marumasa. Di dalam pengembangan obyek wisata memang perlu adanya motivasi dari pemerintah guna mengembangkan obyek wisatanya agar kawasan wisata tersebut semakin berjalan dengan baik. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Asnawan selaku Sekretaris Desa Darubiah mengatakan bahwa :

“Sejauh ini sudah memberikan dukungan secara moril, memotivasi masyarakat disana yang mengelola pantai”. (wawancara Asnawan, 30 Juli 2022)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan yang diberikan pemerintah daerah telah diberikan secara moril, memotivasi masyarakatnya dalam mengembangkan destinasi wisata Pantai Marumasa. Seperti yang dikatakan (Chaplin, 2006) Moril adalah sikap atau semangat yang ditandai oleh adanya kepercayaan diri, motivasi yang kuat untuk meneruskan sesuatu usaha, kegembiraan dan pencapaian tujuan organisasi yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa bahwa Pemerintah Dinas

Pariwisata telah memotivasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengembangkan destinasi kawasan wisata di Pantai Marumasa guna mengembangkan obyek wisatanya. Pemerintah Daerah selalu berkomunikasi dengan masyarakat setempat secara intens. Maka dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakatnya dalam pengembangan obyek wisatanya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Winardi (2000), Motivasi adalah berkenaan selaras gerakan, motif disebutnya hal yang menggerakkan atau mendorong orang untuk berperilaku dengan cara tertentu.

c. Fasilitas

Dalam pengembangan obyek wisata peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi segala kebutuhan kepariwisataan sehingga kepariwisataan dapat terwujud. Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh kelompok sadar wisata. Adapun pada praktiknya Dinas Pariwisata mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam penyediaan segala kebutuhan kelompok sadar wisata untuk menjalankan program kegiatannya Menurut (Pitana dan Gayatri, 2005). Untuk melihat fasilitas yang diberikan pemerintah, maka peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si mengatakan bahwa :

“Sejauh ini fasilitas yang diberikan belum ada, karena kenapa, karena masih kurangnya anggaran”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Dinas Pariwisata belum memberikan fasilitas – fasilitas di Pantai Marumasa, karena masih kurangnya anggaran sehingga fasilitas di Pantai Marumasa masih terbatas. Dan peneliti juga melakukan wawancara untuk melihat fasilitas yang diberikan pemerintah di Pantai Marumasa. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Andi Arwin selaku nelayan mengatakan bahwa :

“Pemerintah tidak ada dia berikan fasilitas sama sekali, makanya terbengkalai begini, banyak sampah di dekat pantainya”. (wawancara Andi Arwin, 30 Juli 2022)

Dari hasil pernyataan informan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang dikatakan Bapak Andi Arwin selaku nelayan mengatakan bahwa saat ini pemerintah belum memberikan fasilitas sama sekali.

Berdasarkan dari hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bahwa Pemerintah Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah belum memberikan fasilitas sama sekali di Pantai Marumasa, sehingga sarana dan prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih minim. Hanya ada beberapa waung yang tersedia, toilet umum, air bersih, dan perabot di tebing untuk spot foto. Sehingga juga banyaknya sampah – sampah berserakan di dekat area pantai karena minimnya fasilitas yang diberikan. Hal ini sudah sesuai dengan teori Yoeti (2003:56) fasilitas wisata adalah semua fasilitas

yang fungsinya memenuhi kebutuhan wisatawan yang tinggal untuk sementara waktu di daerah tempat wisata yang dikunjunginya. Fasilitas merupakan sarana maupun prasarana yang berperan penting dalam usaha meningkatkan kepuasan konsumen. Namun ketersediaannya masih kurang, sehingga fasilitas yang ada masih minim dan dikelola secara pribadi oleh masyarakatnya.

d. Dinamisasi

Dalam mengembangkan kepariwisataan yang baik, perlu adanya peran yang sinergis antara dinas pariwisata, pemerintah desa dan masyarakat agar dapat mencapai suatu pembangunan yang ideal. Dinas pariwisata sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan pihak-pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata Menurut (Pitana dan Gayatri, 2005). Untuk melihat apakah Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, dan Masyarakat saling bersinergis, maka peneliti melakukan pembuktian dengan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang mengatakan bahwa :

“Kami telah melakukan komunikasi secara intens dengan pemerintah daerah dan masyarakat berupa dukungan – dukungan dalam pengembangan pariwisatanya”. (wawancara Muh. Akil. S.Sos., M.Si, 28 Juli 2022)

Dapat dilihat dari pernyataan informan di atas bahwa Pemerintah Dinas, Pemerintah Daerah dan Masyarakat saling bersinergis. Karena sejauh ini hanya dukungan secara moril saja yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya untuk melihat keadaan langsung yang terjadi di Pantai Marumasa, maka peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Asnawan selaku Sekretaris Desar Darubiah yang mengatakan bahwa :

“Kami juga selalu memberikan dukungan – dukungan secara moril dengan masyarakat disana”. (wawancara Asnawan, 30 Juli 2022)

Dari pernyataan informan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Daerah saling bersinergis, selalu memberikan dukungan secara intens kepada masyarakat setempat disana dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan analisa yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah dan Masyarakat saling bersinergis bersama dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah memberikan dukungan secara moril dan saling berkomunikasi secara intens dalam perkembangan obyek wisata Pantai Marumasa. Hal ini sesuai dengan teori Menurut (Pitana dan Gayatri, 2005), dalam mengembangkan kepariwisataan yang baik, perlu adanya peran yang sinergis antara dinas pariwisata, pemerintah desa dan masyarakat agar dapat mencapai suatu pembangunan yang ideal. Dinas pariwisata sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan pihak-pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan hasil analisa yang diperoleh terkait metode pengembangan di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba. Dimulai dari objek dan daya tarik peneliti dapat menyimpulkan bahwa keindahan yang dimilikinya yaitu pantainya yang berpasir putih dan memiliki dua tebing yang mengapit pantai tersebut. Di atas tebingnya memiliki perabot yang indah yang dikelola oleh masyarakat yang dapat menjadi spot foto untuk pengunjung yang datang untuk berwisata. Sarana dan prasarana yang ada disana seperti beberapa warung yang tersedia, toilet umum, dan air bersih yang menjadi fasilitas yang tersedia di Pantai Marumasa. Pemerintah belum memberikan fasilitas yang menjadi penunjang untuk menarik wisatawan untuk berkunjung. Sehingga Pantai Marumasa masih terbengkalai begitu saja, sampah yang masih berserakan karena minimnya fasilitas yang tersedia.

Kemudian terkait dukungan yang diberikan Pemerintah Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah masih dukungan secara moril, belum ada dukungan secara materil yang diberikan di Pantai Marumasa karena masih kurangnya anggaran yang dimiliki. Pemerintah dan masyarakat saling berkomunikasi secara intens dan saling bersinergis dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Marumasa. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa, dalam hal ini dukungan yang diberikan dalam pengembangan Pantai Marumasa masih belum efektif karena Pemerintah belum memberikan dukungan yang lebih kepada masyarakat dalam pengembangan Pantai Marumasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisa pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai strategi pengembangan Obyek Wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba:

1. Terkait metode pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata masih kurang efektif karena fasilitas yang diberikan belum ada sehingga sarana dan prasarana yang ada di Pantai Marumasa masih minim. Potensi yang dimiliki dari Pantai Marumasa ini kaya akan keindahan pantai yang telah diapit oleh dua tebing, namun karena masih kurangnya fasilitas yang diberikan sehingga Pantai Marumasa terbengkalai begitu saja.
2. Dukungan yang telah diberikan Pemerintah Dinas dan Pemerintah Daerah masih melakukan komunikasi secara moril dengan masyarakat Desa Darubiah terkait pengembangan kawasan wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba. Pemerintah selalu memberikan motivasi dan saling bersinergitas bersama dalam pengembangan kawasan wisata, namun yang menjadi kendala dalam pengembangannya ialah kurangnya anggaran sehingga fasilitas yang diberikan pemerintah di Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba belum ada. Hanya saja beberapa warung saja yang menjual makanan ringan dan toilet umum yang tersedia. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa, dalam hal ini dukungan

yang diberikan dalam pengembangan Pantai Marumasa masih belum efektif karena Pemerintah belum memberikan dukungan yang lebih kepada masyarakat dalam pengembangan Pantai Marumasa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai strategi pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba di harapkan :

1. Pemerintah lebih mengupayakan dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba karena wisata ini sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat dan juga potensi yang dimiliki Pantai marumasa ini cukup bagus, akan tetapi fasilitas yang dimilikinya masih minim sehingga terbengkalai begitu saja. Untuk itu pemerintah sebaiknya memberikan fasilitas dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan wisata Pantai Marumasa, serta lebih menonjolkan lagi keunikan yang dimiliki yaitu terdapat pembuatan kapal phinisi di Pantai Marumasa ini.
2. Perlu lagi pemerintah memberikan dukungan yang lebih dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa di Kabupaten Bulukumba agar kedepannya bisa menjadi lebih baik dan dikenal lebih banyak lagi oleh wisatawan lain dan merasa senang dengan keindahan yang ada di Pantai Marumasa. Pemerintah hendaknya lebih memprioritaskan seluruh kawasan yang berpotensi menjadi daya tarik wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Barreto, M. dan K. G. (2015). Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, 4, 773–96.
- Pearce II, R. R. (2008). *Manajemen Strategis* (10th ed.). Salemba Empat.
- Pendit, N. (2002). *Ilmu pariwisata sebuah pengantar*. pradnya paramita.
- Pitana I Gde, G. P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. C.V Andi Offset.
- Rangkuti, F. (2014). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, A. (2015). *Manajemen Strategi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rudi, R. dan. (2016). *L Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 79–96.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Strong, C. . (2014). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik : Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. ANDI.
- Suwantoro. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. ANDI.
- Wheelen, T. L. dan J. D. H. (2008). *Strategic Management and Business Policy* (11th ed.).

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

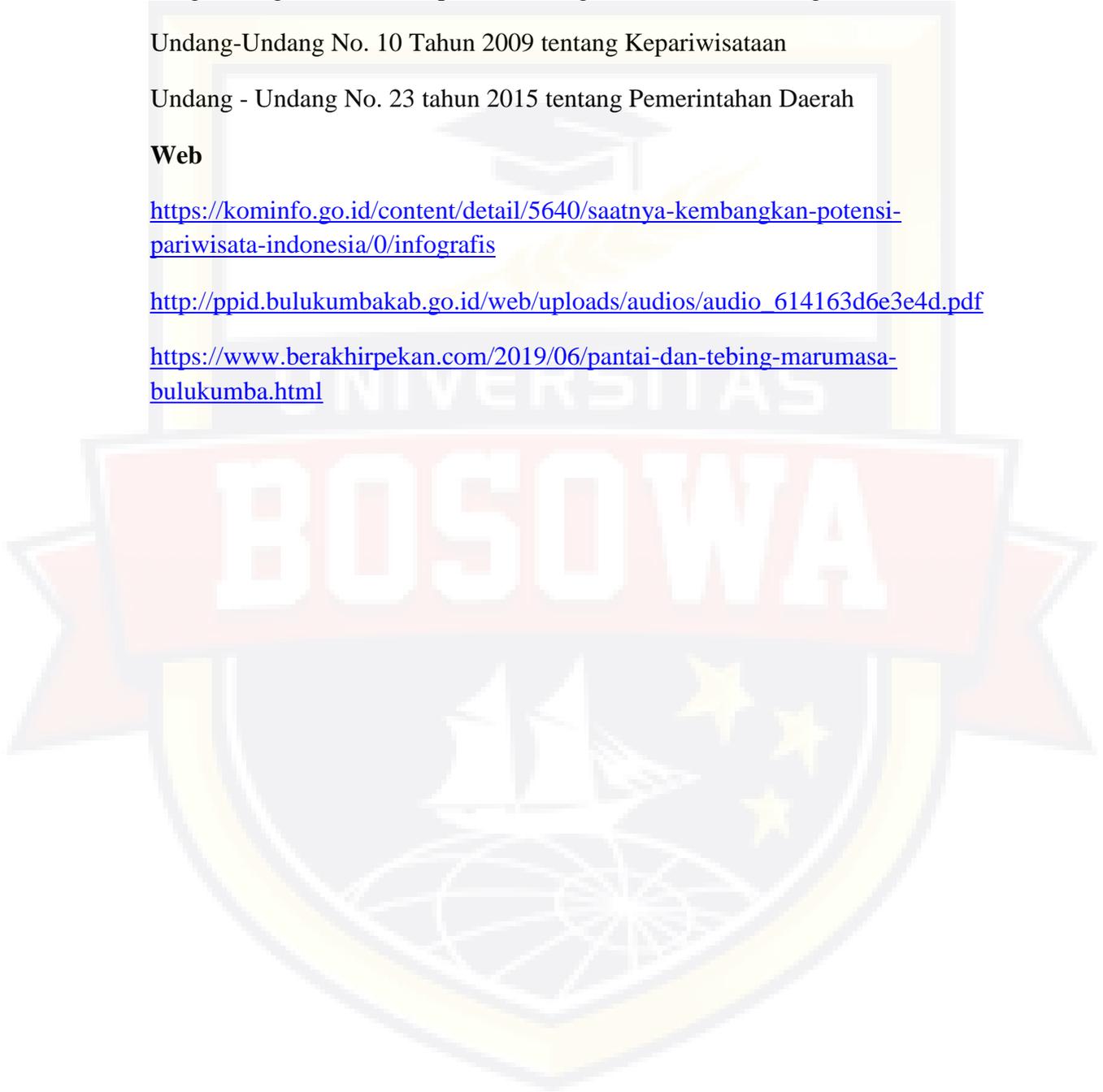
Undang - Undang No. 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Web

<https://kominfo.go.id/content/detail/5640/saatnya-kembangkan-potensi-pariwisata-indonesia/0/infografis>

http://ppid.bulukumbakab.go.id/web/uploads/audios/audio_614163d6e3e4d.pdf

<https://www.berakhirpekan.com/2019/06/pantai-dan-tebing-marumasa-bulukumba.html>



BOSOWA



UNIVERSITAS

BOSOWA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Matrix Pengembangan Instrumen Penelitian

I. Judul Penelitian

STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI MARUMASA DI KABUPATEN BULUKUMBA

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana dukungan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba ?

III. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui metode pengembangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan objek wisata pantai marumasa Kabupaten Bulukumba
2. Mengetahui dukungan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba

IV. Fokus Penelitian

1. Metode Pengembangan
2. Dukungan Pemerintah

V. Informan Penelitian

1. Pemerintah:
 - a. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata = 1 orang
 - b. Sekretaris Desa Darubiah = 1 orang
 - c. Pengelola/stakeholders = 1 orang
 - d. Masyarakat = 1 orang
 - e. Pengunjung/wisatawan = 1 orang

TABEL MATRIX PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

No	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana metode pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba?	Metode Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek dan daya tarik wisata 2. Prasarana wisata 3. Sarana wisata 4. Tata laksana atau infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang b. Kepala Desa Darubiah c. Pengelola/stake holders d. Masyarakat Pengunjung/wisatawan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumen
2	Bagaimana dukungan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba ?	Dukungan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi 2. Motivasi 3. Fasilitas 4. Dinamisasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang b. Kepala Desa Darubiah c. Pengelola/stake holders d. Masyarakat Pengunjung/wisatawan 	<ol style="list-style-type: none"> d. Observasi e. Wawancara f. Dokumen

Lampiran 2 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1	Muh. Akil. S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2	Asnawan	Sekretaris Desa Darubiah
3	Arma Yusi	Pengelola/stakeholders
4	Andi Arwin	Masyarakat
5	Nurul Fitra	Pengunjung/wisatawan



Lampiran 3 Pedoman Wawancara

A. Metode pengembangan dalam strategi pengembangan Pantai Marumasa

- a. Obyek dan Daya Tarik
 1. Apa yang menjadi daya tarik dari Pantai Marumasa?
 2. Apa saja kelebihan yang dimiliki Pantai Marumasa?
- b. Prasarana Wisata
 1. Apa saja prasarana yang dimiliki Pantai Marumasa?
 2. Apakah pemerintah sudah memberikan bantuan dalam prasarana Pantai Marumasa?
- c. Sarana Wisata
 1. Apa saja sarana yang dimiliki Pantai Marumasa?
 2. Apakah pemerintah sudah memberikan sarana di Pantai Marumasa?
- d. Tata laksana dan infrastruktur
 1. Apakah pemerintah ikut serta dalam pembangunan sarana dan prasarana?

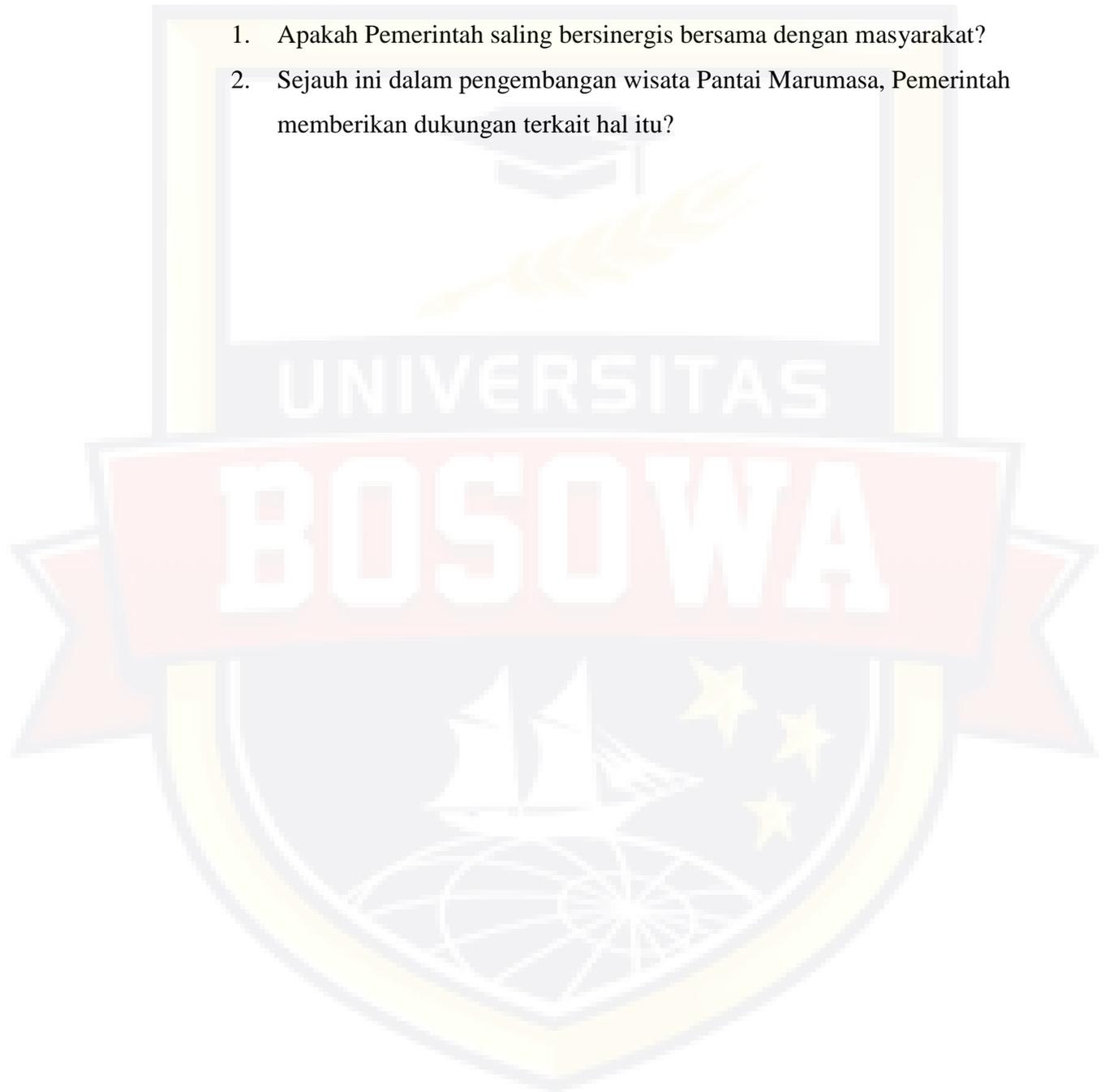
B. Dukungan apa yang diberikan pemerintah dalam pengembangan Pantai Marumasa?

- a. Koordinasi
 1. Apakah Pemerintah Dinas saling berkoordinasi dengan masyarakat dan Pemerintah Desa?
 2. Dukungan apa saja yang diberikan masyarakat dalam pengembangan obyek wisata Pantai Marumasa?
- b. Motivasi
 1. Apakah Pemerintah Dinas dan Pemerintah Desa telah memotivasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisatanya?
- c. Fasilitas
 1. Apa saja fasilitas yang ada di Pantai Marumasa?
 2. Sejauh ini Pemerintah sudah memberikan fasilitas yang ada di Pantai Marumasa?

3. Apakah fasilitas saat ini yang tersedia di Pantai sangat membantu bagi wisatawan yang berkunjung?

d. Dinamisasi

1. Apakah Pemerintah saling bersinergis bersama dengan masyarakat?
2. Sejauh ini dalam pengembangan wisata Pantai Marumasa, Pemerintah memberikan dukungan terkait hal itu?



Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.379/FSP/UNIBOS/VII/2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**Kepada Yth,
Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata**

**Di-
Kabupaten Bulukumba**

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : FIRDHA NUR ANANDA
NIM : 4518021035
Judul penelitian : Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Marumasa Di Kabupaten Bulukumba
Tempat : Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Waktu : Juli – Agustus 2022

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 22 Juli 2022
Dekan Fisip Unibos,


Dr. Cudi Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN : 0905107005

Tembusan :
1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Dahlia No.02 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Nomor : 070/ ^{GM} Kesbangpol/VII/2022 Yth. Kepada
Sifat : Biasa Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
Lampiran : - Tenaga Kerja Kab.Bulukumba
Perihal : Rekomendasi di-
Jl. Kenari No 13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Dekan Fisip Unibos Makassar Nomor : A.379/FSP/UNIBOS/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 Perihal Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : FIRDHA NUR ANANDA
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 06 - 04 - 2000
No.Pokok : 4518021035
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi UNIBOS Makassar
Alamat : Perum Permata Sudiang Blok 1 5 No. 7 Makassar
Hp. 0898 8611 800
Email : firdhanurananda@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Camat Bonto Bahari dan Desa Darubiah Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul:

" STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI MARUMASA DI KABUPATEN BULUKUMBA "

S e l a m a : Tmt. 28 Juli s/d 03 Agustus 2022
Pengikut/Anggota Team : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.

Bulukumba, 28 Juli 2022

KEPALA BADAN

AJIMAD ARFAN, SIP, MT
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19711212 199202 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kabupaten Bulukumba
3. Dekan Fisip UNIBOS di Makassar
4. Peninggal



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 28 Juli 2022

Nomor : 466/DPMPTSPK/VII/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba
2. Camat Bonto Bahari Kab. Bulukumba
3. Kepala Desa Darubiah Kab. Bulukumba
Masing – Masing

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/614/Kesbangpol/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : FIRDHA NUR ANANDA
Nomor Pokok : 4518021035
Program Studi : ILMU. ADM. NEGARA
Institusi : UNIBOS MAKASSAR
Alamat : PERUM BUMI PERMATA SUDIANG BLOK I 5 NO. 7 MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Bonto Bahari dan Desa Darubiah Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan judul "STRATEGI PEGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI MARUMASA DI KABUPATEN BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 28 Juli s/d 03 Agustus 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampul hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



FERRYMAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19820212 200212 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 31 (0413) 83700 Fax. (0413) 83700
E-mail : disbudparbulukumba@gmail.com, website: [www. Bulukumbatourism.com](http://www.Bulukumbatourism.com)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 070 /496 /Disparpora.4/VIII/2022

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 466/DPMPSTK/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022, Perihal izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **Firdha Nur Ananda**
No. Pokok : 4518021035
Prog. Studi : Ilmu Administrasi Negara
Institusi : Universitas Bosowa Makassar
Alamat : Perum Bumi Permata Sudiang Blok I 5 No. 7 Makassar

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data mulai tanggal 28 Juli s/d 03 Agustus 2022 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Bulukumba dengan judul skripsi "**STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI MARUMASA KABUPATEN BULUKUMBA**" sebagai syarat penyelesaian studi Strata Satu (1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 02 Agustus 2022

An. Kepala Dinas
Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan
Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Indrawaty Amin, SE., M.Si
Pangkat. Pembina /IV.a
Nip. 19710528 200003 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOBahari

Jl. Mesjid Raya No.282 Telp. (0413) 2587505 Tanahberu

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 182./420/BB/VIII/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ABDUL SYUKUR, S.Pd**
NIP : 19690805 199203 1 008
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Sekretaris Camat Bontobahari

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **FIRDHA NUR ANANDA**
Nomor Pokok : 4518021035
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Institusi : Unibos Makassar
Alamat : Perum Bumi Permata Sudiang Blok I 5 No.7 Makassar.

Yang tersebut namanya diatas telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Bontobahari Kelurahan Benjala dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI MARUMASA DI KABUPATEN BULUKUMBA."**

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Tanahberu, 01 Agustus 2022





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOBAHARI
DESA DARUBIAH

Alamat : Jl. Poros Kasuso No. 8 Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari

SURAT KETERANGAN

Nomor : 297/140/DRB/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI SYAMSIR ACHYAT PATUNRU, S.Pt.**
Jabatan : Penjabat Kepala Desa
Alamat : BTN Ujung Bulu Permai Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FIRDHA NUR ANANDA**
Nomor Pokok : 4518021035
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Institusi : Universitas Bosowa Makassar
Alamat : Perum Bumi Permata Sudiang Blok I 5 No. 7 Makassar

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Darubiah dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** dengan judul : **"STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI MARUMASA DI KABUPATEN BULUKUMBA"** yang berlangsung dari tanggal 28 juli s/d 03 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Darubiah, 02 Agustus 2022.



K. Pj. KEPALA DESA DARUBIAH,

ANDI SYAMSIR ACHYAT PATUNRU, S.Pt.

: Pembina /IV a
NIP. : 19680220 200312 1 003
No. SK : 188.45-264 Tahun 2022
Tanggal : 10 Juni 2022

Lampiran 4 Dokumentasi



Keterangan : Dokumentasi bersama Bapak Muh. Akil. S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan sedang melakukan wawancara tentang bagaimana Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Marumasa Di Kabupaten Bulukumba



Keterangan : Dokumentasi bersama Bapak Asnawan selaku Skeretaris Desa Darubiah dan sedang melakukan wawancara tentang bagaimana Strategi Pengembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Bulukumba



Keterangan : Dokumentasi bersama Bapak Arma Yusi selaku pengelola dan masyarakat sedang melakukan wawancara tentang bagaimana kondisi Pantai Marumasa dan dukungan apa saja yang diberikan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Marumasa



Keterangan : Dokumentasi bersama Bapak Andi Arwin selaku nelayan dan masyarakat sedang melakukan wawancara tentang tentang bagaimana kondisi Pantai Marumasa dan dukungan apa saja yang diberikan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Marumasa



Keterangan : Dokumentasi bersama Nurul Fitra selaku Pengunjung sedang melakukan wawancara tentang bagaimana kondisi Pantai Marumasa Kabupaten Bulukumba



Keterangan : Dokumentasi Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba

UNIVERSITAS
BOSOWA





Keterangan : Kantor Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten
Bulukumba



Keterangan : Dokumentasi Pantai Marumasa Di Kabupaten Bulukumba